



Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tanah Laut

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



# LKJ



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 2425788**  
**PELAIHARI**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 100.3.3/ 6 / BPKAD/ 2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKj) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).
  - b. bahwa untuk melegalkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 Nomor 6);.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119);

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama
- :
- : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
- Kedua
- :
- : Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan terkait mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) : Perencanaan, Pengumpulan data, Pengukuran kinerja, Pemantauan, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
  - b. Mengkoordinasikan secara bersama dalam rapat berkala Triwulan (3 bulanan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
  - c. Bertanggung jawab terhadap segala hasil Evaluasi dan Revisi yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama
- Keempat : Agar seluruh personil Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Januari 2025

**KEPALA BADAN,**



**MUHAMMAD DARMIN**

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR :100.3.3/ 6 /BPKAD/2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKj) TAHUN 2024 PADA BPKAD  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris BPKAD	Pengarah
3	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang Akuntansi
5	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Koordinator Bidang Belanja dan Pembiayaan
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Koordinator Bidang Penatausahaan Aset
7	Kepala Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset	Koordinator Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Kasubbag Keuangan	Anggota
10	Kasubbid Akuntansi Pendapatan & Pengelolaan Kas	Anggota
11	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Anggota
12	Kasubbid Kasubbid Inventarisasi	Anggota
13	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Anggota
14	Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan	Anggota
15	Kasubbid Anggaran	Anggota
16	Kasubbid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Anggota
17	Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan	Anggota

**KEPALA BPKAD,**



**MUHAMMAD DARMIN**

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L K j )**

**UNIT KERJA BPKAD  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH**

Jalan. A. Syairani Pelaihari Telp. ( 0512 ) 21274

## RINGKASAN EKSEKUTIF

**P**uji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategik (Renstra).

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, 17 Januari 2025

Kepala BPKAD  
Kabupaten Tanah Laut,



**Muhammad Darmin, S.IP, M.Si**  
**NIP.196612271987031002**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Cascading Kinerja .....	4
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	14
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran .....	15
H. Tindak lanjut atas LHE SAKIP Tahun sebelumnya.....	23
I. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....</b>	<b>27</b>
A. Tujuan, Sasaran Kabupaten.....	27
B. Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	30
C. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024.....	33
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	36
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>41</b>
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	42
1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis PD (IKU Eselon II).....	42
2. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan realisasi.....	44
3. Analisa keberhasilan /kegagalan, hambatan dan langkah-langkah antisipasi yang diambil .....	72

B. Akuntabilitas Keuangan.....	79
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024.....	79
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran, Program.....	83
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024.....	118

**BAB IV PENUTUP..... 138**

A. Kesimpulan.....	138
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	141

**LAMPIRAN**

Lampiran 1 IKU 2024

Lampiran 2 Pohon Kinerja

Lampiran 3 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 4 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2024

Lampiran 5 Monev Renstra

Lampiran 6 Matriks Keselarasan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaannya juga telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan sebuah tekad seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam Laporan Kinerja (LKj) hal-hal yang dimuat tentunya meliputi Penilaian kinerja yang menyangkut baik segi-segi kuantitas dan kualitas dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, motivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian budget, mendorong SKPD agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan publik. Dari pemahaman seperti itu dapat dirinci dalam butir-butir penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah antara lain yaitu :

- 1) Seberapa jauh efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 2) Seberapa jauh kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain apakah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3) Seberapa banyak (kuantitas) dan bagaimana mutu (kualitas) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
- 4) Bagaimana dengan ketepatan lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan yang seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun untuk meningkatkan kinerjanya ditahun – tahun berikutnya
3. Dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

### **C. DASAR HUKUM**

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 antara lain didasarkan atas :

- a. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- g. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

#### **D. CASCADING KINERJA**

Cascading kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**CASCADING KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

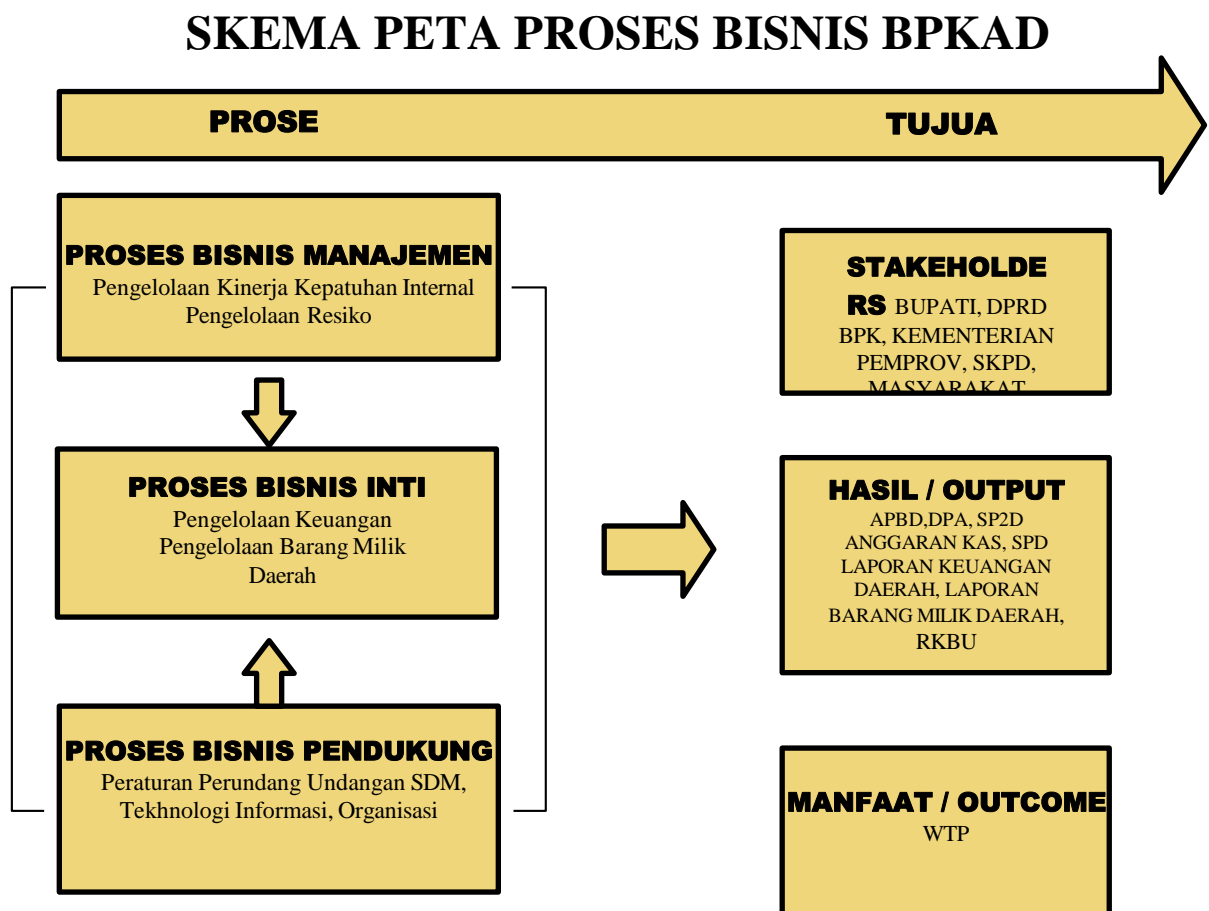
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)												
Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi												
TUJUAN RPD	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah											
INDIKATOR RP	Nilai SAKIP Kabupaten											
TUJUAN OPD	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah						Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
INDIKATOR 1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah						Nilai SAKIP Kabupaten					
SASARAN OPD	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Akuntabel						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD					
INDIKATOR 1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						Nilai SAKIP BPKAD					
SASARAN OPD	Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah											
INDIKATOR 2	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD											
SASARAN OPD	Meningkatnya Kessestiaan Penganggaran dengan Perencanaan											
INDIKATOR 3	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan											
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH					
SASARAN PROGRAM	Terlaksananya pengendalian ketersediaan kas daerah sesuai SOP						Terwujudnya pengelolaan aset yang					
INDIKATOR	Nilai Komponen Perencanaan						Nilai Komponen Perencanaan					
KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Pemangku Urusan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Akuntansi	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya kinerja Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya kinerja Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya kinerja Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya kinerja Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya kinerja Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya kinerja Akuntabilitas Kinerja BPKAD
INDIKATOR	Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana KUA dan PPAS	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Palatan Dinas Berserta Atribut Perangkatnya	Pengamanan Palatan Dinas Berserta Atribut Perangkatnya	Pengamanan Palatan Dinas Berserta Atribut Perangkatnya	Pengamanan Palatan Dinas Berserta Atribut Perangkatnya	Pengamanan Palatan Dinas Berserta Atribut Perangkatnya	Pengamanan Palatan Dinas Berserta Atribut Perangkatnya	Pengamanan Palatan Dinas Berserta Atribut Perangkatnya
OUTPUT	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Palatan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Palatan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Palatan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Palatan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penatausahaan Pembelian Daerah	Pengelolaan Dana Daerah dan Mendesk	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kawajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Penutupan-LO, dan Belanja	Pengawasan dan Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengisian verifikasi keuangan APBD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
OUTPUT	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembelian Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Mendesk	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kawajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Penutupan-LO, dan Belanja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	Jumlah Paket Mebel yang Disiapkan	Jumlah Paket Mebel yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengisian verifikasi keuangan APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Pelaksanaan Kegiatan dan Pemantauan Pelaksanaan APBD Bulanan	Koordinasi, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
OUTPUT	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan		
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan, Pelaksanaan Analisis Pembelian dan Penempatan	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembelian dan Penempatan	Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BULID dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	Koordinasi Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Penyediaan bahan/ material	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan		
OUTPUT	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembelian dan Penempatan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BULID dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Paket Bahan/ material yang Disiapkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disiapkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disiapkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan		
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Bersesuaian dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Kas serta	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Bersesuaian dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Kas serta	Penyusunan Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga yang Disusun		
OUTPUT	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembelian dan Penempatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembelian dan Penempatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik		
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kabupaten Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kabupaten Barang Milik Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
OUTPUT	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembelian dan Penempatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyaluran Tunjangan Perencanaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyaluran Tunjangan Perencanaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga							
OUTPUT	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyaluran Tunjangan Perencanaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyaluran Tunjangan Perencanaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Paket Penyediaan Perlatan Rumah Tangga yang disediakan							
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Penilaian Barang Milik Daerah								
OUTPUT	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah								
SUB KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	Penilaian Barang Milik Daerah								
OUTPUT	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah								

## E. PROSES BISNIS, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

### 1. PROSES BISNIS

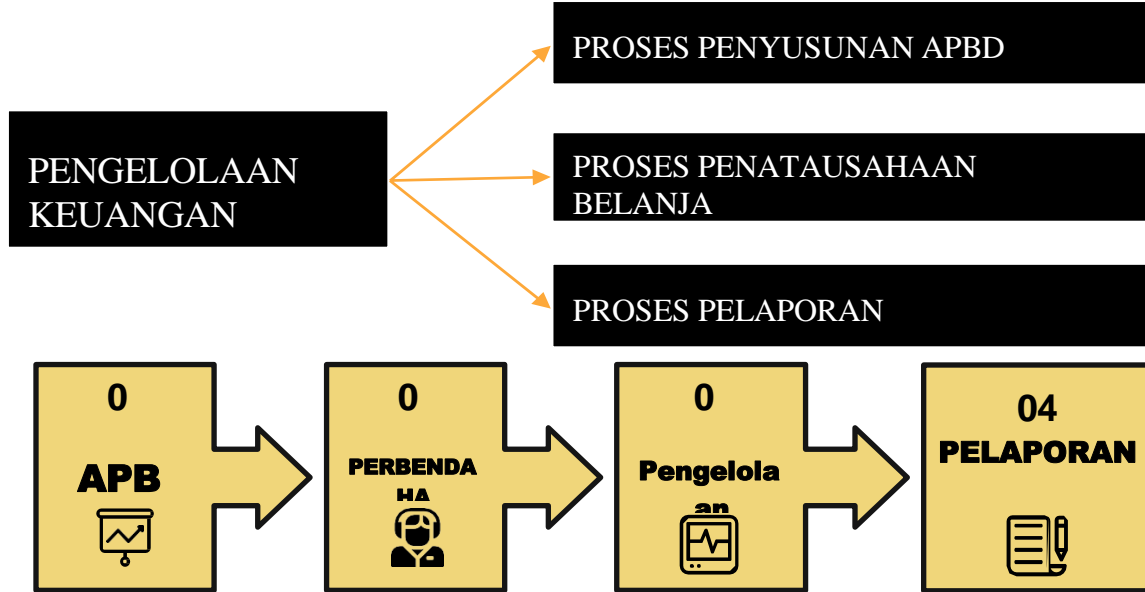
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis dilingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut membuat Peta Proses Bisnis sebagaimana dibawah ini :



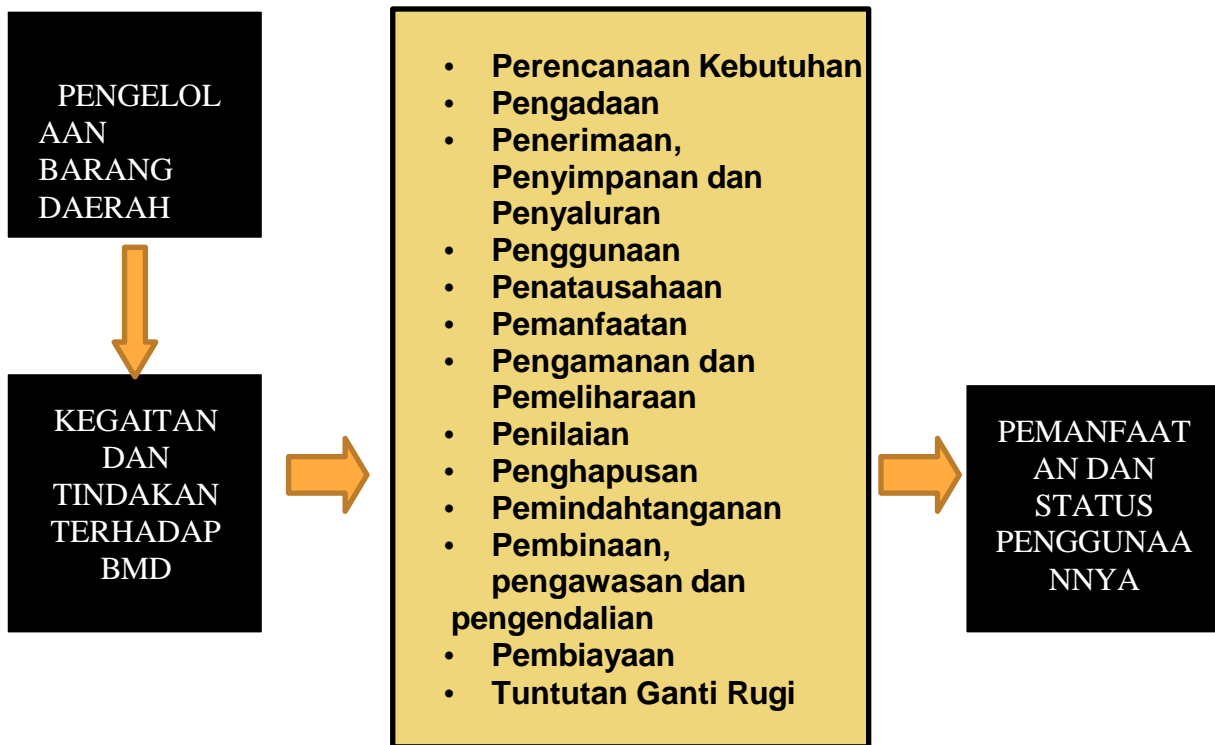
# PROSES BISNIS INTI

## 1. PENGELOLAAN KEUANGAN



# PROSES BISNIS INTI

## 2. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



# PROSES BISNIS PENDUKUNG

## Teknologi Informasi



## 2. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara

Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
  - a) Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD ( Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2021 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.

10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

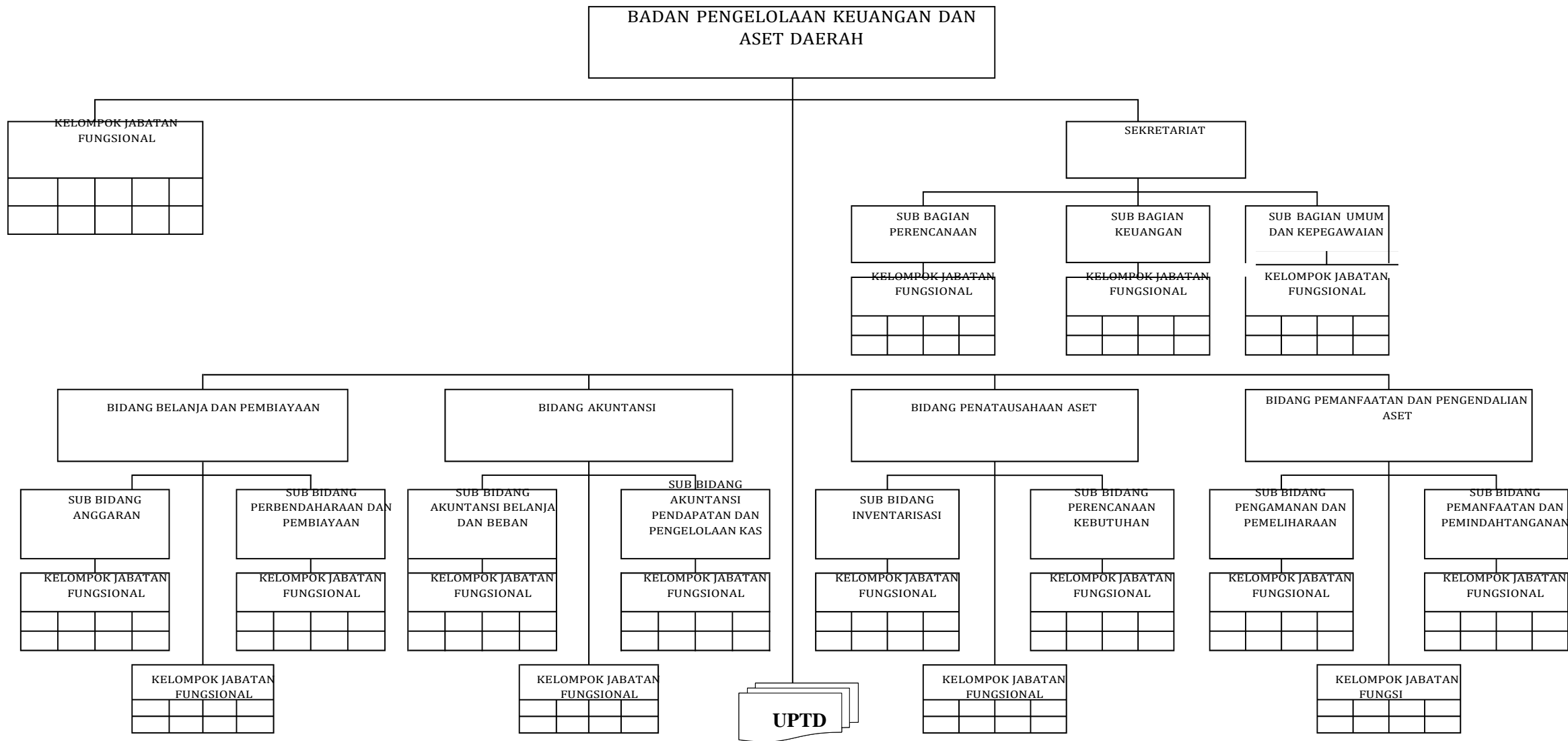
1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan SPD.
3. Menerbitkan SP2D.
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Menyimpan uang daerah.
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

### **3. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b) Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;

- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Anggaran;
  - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.
- d) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas
  - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban.
- e) Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Inventarisasi;
  - 2) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.
- f) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
  - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- g) UPT; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.



## **F. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut :

### **1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah**

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

### **2. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **3. Peningkatan pengelolaan aset daerah.**

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

## **G. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024 memiliki PNS berjumlah 43 orang yang sangat berperan dalam rangka mendukung sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan Organisasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

a) Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- S-2 : 3 orang
- S-1 : 21 orang
- D-III : 16 orang
- SLTA : 3 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

b) Berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 0 orang
- IV/a : 4 orang
- III/d : 7 orang
- III/c : 7 orang
- III/b : 5 orang
- III/a : 12 orang
- II/d : 5 orang
- PPPK IX : 1 orang
- PPPK VII : 1 orang

c) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf, terdiri dari :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 11 orang
- Jabatan Fungsional: 1 orang
- Staf : 24 orang
- Staf Fungsional : 2 orang

Sedangkan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 19 orang yang terdiri dari tenaga kebersihan, petugas jaga malam dan tenaga administrasi dan sangat berperan dalam rangka mendukung sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan Organisasi.

Adapun sumber daya yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Daftar Sarana dan Prasarana  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024**

No	Jenis Barang	Jumlah Barang		No	Jenis Barang	Jumlah Barang	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	buah	54	Mesin Jilid	2	buah
2	A.C. Split	51	buah	55	Kichen Set	2	buah

3	Alat Dapur lainnya	1	buah	56	Mesin Pemotong Rumput	1	buah
4	Alat Kantor Lainnya	1	buah	57	Mesin Pengering Tangan	2	buah
5	Alat Pembersih lainnya	2	buah	58	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	buah
6	Alat Pendingin lainnya	5	buah	59	Microphone/Wireless MIC	5	buah
7	Kursi Tunggu	7	buah	60	Monitor	1	buah
8	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	buah	61	Tabung Gas	2	buah
9	Bangku Tunggu	7	buah	62	P.C Unit	50	buah
10	Brandkas	4	buah	63	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	buah
11	Camera Electronic	2	buah	64	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1	buah
12	CCTV - Camera Control Television System	14	buah	65	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	buah
13	Digital Multi Tester	1	buah	66	Pompa Air	2	buah
14	External CD/ DVD Drive (ROM)	2	buah	67	Portable Compressor	1	buah
15	External/ Portable Hardisk	10	buah	68	Printer (Peralatan Personal Komputer)	77	buah
16	Filing Cabinet Besi	33	buah	69	Rak Besi	128	buah
17	Genset	3	buah	70	Router	1	buah
18	Gordyin/Kray	6	buah	71	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	20	buah
19	Lemari Es	2	buah	72	Scooter	7	buah
20	Hard Disk	2	buah	73	Sepeda Motor	15	buah
21	Hub	2	buah	74	Server	1	buah
22	Karpet	8	buah	75	Sofa	3	buah
23	Kipas Angin	2	buah	76	Sound System	2	buah
24	Kursi Besi/Metal	41	buah	77	Stabilisator	2	buah
25	Kursi Biasa	1	buah	78	Tangga	1	buah
26	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	buah	79	Televisi	9	buah
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	80	Tong Air/ Tandon Air	2	buah
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	buah	81	Tool Kit Set	1	buah
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	buah	82	Uninterrupted Power Supply (UPS)	50	buah
30	Kursi Putar	72	buah	83	White Board	3	buah
31	Kursi Rapat	180	buah	84	Wireless Access Point	2	buah
32	Kursi Rapat Pejabat lainnya	3	buah	85	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2	buah
33	Kursi Tamu	2	buah	86	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	buah

<b>34</b>	Lap Top	35	buah	<b>87</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	buah
<b>35</b>	Layar Film/Projector	3	buah	<b>88</b>	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	buah
<b>36</b>	Lemari Besi/Metal	20	buah	<b>89</b>	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	buah
<b>37</b>	Lemari Kaca	1	buah	<b>90</b>	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	buah
<b>38</b>	Lemari Kayu	19	buah	<b>91</b>	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	buah
<b>39</b>	Loudspeaker	5	buah	<b>92</b>	Pagar Permanen	1	buah
<b>40</b>	Meja Kerja Besi/Metal	18	buah	<b>93</b>	Selasar	1	buah
<b>41</b>	Meja Kerja Kayu	75	buah	<b>94</b>	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	buah
<b>42</b>	Meja Komputer	2	buah	<b>95</b>	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	buah
<b>43</b>	Meja Rapat	67	buah	<b>96</b>	Jaringan listrik lainnya	3	buah
<b>44</b>	Mesin Bor Tangan	1	buah	<b>97</b>	Saluran Pembuang Air	1	buah
<b>45</b>	Mesin Gerinda	1	buah	<b>98</b>	Buangan Air Pertanian	1	buah
<b>46</b>	Mic conference	8	buah	<b>99</b>	Alat Stodio Lainnya	5	buah
<b>47</b>	Tiang Bendera	1	buah	<b>100</b>	Acces Point	5	buah
<b>48</b>	Dispenser	6	buah	<b>101</b>	Sepatu Lapangan	13	buah
<b>49</b>	Kursi Kerja non struktural	14	buah	<b>102</b>	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya permanen	1	buah
<b>50</b>	Tripot Camera	1	buah				
<b>51</b>	Lensa Camera	1	buah				
<b>52</b>	Layar Film/Projektor	3		<b>103</b>	Software	3	buah
<b>53</b>	Camera Corferen	1		<b>104</b>	kajian	1	buah

Terdapat keterkaitan antara jumlah SDM aparatur dengan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat menunjang dan mendukung dalam rangka pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun terakhir cukup berhasil, tetapi bukan berarti sempurna, tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD yang juga adalah merupakan implementasi dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut diharapkan mewujudkan Tujuan dan Sasaran SKPD yang telah ditetapkan tersebut seperti yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Sedangkan kondisi sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung produk dan pelayanan pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah SDM aparatur dengan sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Produk dan layanan yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berdasarkan dengan tugas pokok fungsi yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagai berikut di bawah ini :

Produk dan Layanan pada Bidang Belanja dan Pembiayaan meliputi:

- 1) Penyusunan Penganggaran Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Lainnya;
- 2) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 3) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

- 4) Penerbitan SKPP PNS Pensiun, Meninggal Dunia (Janda/Dudanya) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut)
- 5) Mutasi Gaji antar SKPD ( Dalam Pemerintah Kabupaten Tanah laut )
- 6) Penggunaan BTT untuk Mendanai Keadaan Darurat
- 7) Penggunaan BTT untuk Mendanai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Produk dan Layanan pada Bidang Akuntansi meliputi;

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Kabupaten Tanah Laut.
- 3) Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan Triwulan SKPD dan SKPKD BPKAD Kab. Tanah Laut.
- 4) Pelaporan DAK Fisik Kab. Tanah Laut.
- 5) Pelaporan DAK Non Fisik Kab. Tanah Laut.
- 6) Pelaksanaan Koreksi dan Pengembalian Belanja Kab. Tanah laut.
- 7) Pelaksanaan Rekonsiliasi Belanja Modal (Aset) Bidang Akuntansi dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kab. Tanah laut.
- 8) Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan Kab. Tanah Laut
- 9) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kab. Tanah Laut Sub Bid Belanja dan Beban
- 10) Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Pusat antara Kab. Tanah laut dengan KPPN dan KPP PRATAMA Banjar Baru.
- 11) Penyusunan Perda Perbub Pemerintah Daerah Kab. Tanah laut.
- 12) Pelaksanaan pengajuan User Simcloud BPKAD Kab. Tanah laut.
- 13) Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan dan Piutang Kabupaten Tanah Laut.
- 14) Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tanah Laut
- 15) Pelaksanaan Koreksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut
- 16) Penyusunan LKPD Kabupaten Tanah Laut. Sub Bid Pendapatan dan Pengelolaan Kas
- 17) Pelaksanaan Rekonsiliasi Kas Daerah Kab. Tanah Laut.
- 18) Pelaksanaan Penyusunan Laporan Bulanan SIKD BPKAD Kab. Tanah Laut.

Produk dan Layanan pada Bidang Penatausahaan Aset meliputi :

- 1) Pembukuan Barang Milik Daerah
- 2) Pelaporan Barang Milik Daerah
- 3) Proses Inventarisasi (sensus) Barang Milik Daerah
- 4) Penatausahaan Barang Persediaan.
- 5) Pelaporan Barang Pakai habis.
- 6) Penyusunan Stándar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Berdasarkan Usulan SKPD
- 7) Penyusunan Stándar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
- 8) Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Stándar Belanja (ASB) Bersifat Pekerjaan fisik.
- 9) Penyampaian Usulan Stándar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Stándar Belanja (ASB) Bersifat Pekerjaan fisik. Berdasarkan Perubahan Usulan maupun Usulan Baru dari SKPD
- 10)Perubahan RKBMD

Produk dan Layanan pada Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset meliputi :

- 1) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Hibah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 2) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan.
- 3) Proses Penilaian Dalam Rangka Penyusunan Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 4) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penyertaan Modal
- 5) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Tukar Menukar.
- 6) Proses Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 7) Proses Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 8) Proses Penggunaan Barang Milik Daerah Penetapan Status Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut
- 9) Proses Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah

- 10) Penggunaan Barang Milik Daerah Pengalihan Status Barang Milik Daerah
- 11) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah
- 12) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Kerjasama pemanfaatan Infrastruktur (KPSI)
- 13) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa
- 14) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Pinjam Pakai
- 15) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
- 16) Penggunaan Barang Milik Daerah Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
- 17) Pengamanan Administrasi Tanah Barang Milik Daerah
- 18) Pengamanan Hukum Tanah Barang Milik Daerah
- 19) Pengamanan Fisik Tanah Barang Milik Daerah
- 20) Pengamanan Fisik Gedung dan/atau Bangunan Barang Milik Daerah
- 21) Pengamanan Administrasi dan Hukum Gedung dan/atau Bangunan Barang Milik Daerah
- 22) Pengamanan Hukum Kendaraan Barang Milik Daerah
- 23) Pengamanan Fisik dan Administrasi Kendaraan Barang Milik Daerah
- 24) Pengamanan Rumah Tangga Barang Milik Daerah
- 25) Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 26) Pembuatan Permohonan Surat Pengantar Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Tanah laut Melalui Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (SIM PKB).

Adapun produk layanan yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut lainnya setiap hari adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Produk Layanan BPKAD Kabupaten Tanah Laut**

No	NAMA PRODUK LAYANAN	SUBSTANSI	PENGGUNA LAYANAN	APLIKASI YANG DIGUNAKAN
1	SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Mutasi dan Pensiun)	Administrasi Keuangan	ASN Mutasi dan ASN Pensiun	Aplikasi SIM Gaji
2	SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	Administrasi Keuangan	SKPD	Aplikasi SIPD Penatausahaan
3	Surat Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas SKPD	Administrasi Aset	SKPD	Aplikasi Sm PKB

Tahun anggaran 2024 total anggaran yang diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 331.262.636.438,- Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024**

	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	Bertambah/Berkurang
<b>Pendapatan</b>	<b>1.924.570.370.055,-</b>	<b>1.972.980.732.129,-</b>	<b>48.410.362.074,-</b>
<b>Belanja</b>	<b>433.968.896.348,-</b>	<b>331.262.636.438,-</b>	<b>(102.706.259.910)</b>

## **H. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 terhadap Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 dari Inspektorat nomor 700.1.2.1/75/LHE AKIP-Irban II/Insp/2024 tanggal 1 April 2024 bahwa dimana BPKAD Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan Nilai 82,85 atau dengan Predikat "A" (Memuaskan), namun masih terdapat rekomendasi untuk perbaikan laporan utk yang akan datang, adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja rekomendasinya adalah agar dokumen perencanaan kinerja dipertahankan waktu penetapannya, diperhatikan waktu publikasinya agar selalu tepat waktu

2. Pengukuran Kinerja rekomendasinya adalah agar diperhatikan hasil wawancara untuk membandingkan antara SKP, E Kinerja bulanan, dan pohon kinerja dilakukan pada setiap pegawai.
3. Pelaporan Kinerja rekomendasinya adalah agar rekomendasi/rencana aksi laporan kinerja digunakan sesuai dengan hambatan yang dihadapi.
4. Evaluasi Internal rekomendasinya adalah agar SKPD mempertahankan untuk tetap menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal (Inspektorat) tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hasil rekomendasi yang telah disampaikan tersebut maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut telah membuat Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya dan telah disampaikan ke Inspektorat dan tabel tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024					
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT					
Nomor	Komponen Penilaian	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja	Agar dokumen perencanaan kinerja dipertahankan waktu penetapannya diperhatikan waktu publikasinya agar selalu tepat waktu	Akan menyusun rencana aksi untuk tetap mempertahankan waktu penetapannya serta memperhatikan waktu publikasinya tepat waktu melalui media sosial.	SK Kepala BPKAD ttg SK Penetapan Pembentukan Tim Penyusunan Renja Tahun 2024 adalah Nomor : 050.13/ 9 /BPKAD/2023 Tgl 3 Januari 2023. Dan SK Kepala BPKAD ttg SK Penetapan Renja Tahun 2024 adalah Nomor : 050.13/ 17 /BPKAD/2023 tanggal 20 Juli 2023	Renja Tahun 2024 telah di publikasikan di Website PPID, sedangkan Renja Tahun 2025 masih proses reuiu di Inspektorat
2	Pengukuran Kinerja	Agar diperhatikan hasil wawancara untuk membandingkan antara SKP, E Kinerja Bulanan dan Pohon Kinerja dilakukan pada setiap pegawai	Akan dibuat matrik kesesuaian antara SKP, E Kinerja Bulanan dan Pohon Kinerja dan dilakukan pada setiap pegawai secara berkala	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Kasubbag Kepegawaian dan akan dibuat rencana aksi	-
3	Pelaporan Kinerja	Agar rekomendasi / rencana aksi Laporan Kinerja digunakan sesuai dengan hambatan yang dihadapi	Akan menyusun rencana aksi sesuai hambatan yang dihadapi	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Bidang-Bidang agar Laporan Kinerja digunakan sesuai dengan hambatan yang dihadapi	-
4	Evaluasi Internal	Agar SKPD mempertahankan untuk tetap menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal (Inspektorat) tahun sebelumnya	Akan menindaklanjuti hasil evaluasi internal tahun sebelumnya	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Bidang-Bidang agar mempertahankan untuk tetap menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.	-

Untuk selanjutnya BPKAD Kabupaten Tanah Laut akan menjadikan hasil rekomendasi serta tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya tersebut sebagai bahan evaluasi internal dan sebagai bahan dalam meningkatkan kualitas SAKIP dilingkungan internal sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja untuk tahun berikutnya.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum

D. Cascading Kinerja

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

I. Sistematika Penulisan

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Tujuan, Sasaran Kabupaten

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

D. Instrumen pendukung Capaian Kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Yang berisikan sebagai berikut :

a. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah ( IKU Eselon II)

b. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan realisasi

c. Analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan dan langkah-langkah antisipasi yang diambil

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran, Program
3. Perbandingan Program, dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. IKU
2. Pohon Kinerja
3. Perjanjian Kinerja
4. Capaian Kinerja Triwulan I sd IV
5. Monev Renstra
6. Matriks Keselarasan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. TUJUAN, SASARAN KABUPATEN**

Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024; 2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan,

dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan. Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layananlayanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih. Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing aspek kemudian dielaborasikan menjadi 3 tujuan dengan 19 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (cross cutting issue)

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja

pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemampuan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 Isu strategis Kabupaten Tanah Laut salah satunya adalah “Reformasi Birokrasi” yaitu dengan meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( Good Governance) dimana BPKAD Kabupaten Tanah Laut berperan untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 tersebut.

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026**

No	Tujuan /Sasaran Kabupaten	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun			Ket
			2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	66	71	76	

Sumber Data : RPD Kab.Tala 2024-2026

## **B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sangat menentukan bagi jalannya suatu organisasi. Oleh karena itu harus dibuat setepat dan secermat mungkin agar benar – benar dapat dilaksanakan dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan RPD Kabupaten.

Dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 bahwa peran BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan Badan Pengolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**Tabel 2.2**

**Tujuan BPKAD kabupaten Tanah Laut**

No	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan SKPD	Target Tahun			Satuan
			2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	66	71	76	Nilai
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	70,1	75	80,1	Nilai

Sumber Data : RPD Kab.TALA 2024-2026

Dalam tujuan itu terkandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai “akuntabel” dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan itu diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kata “akuntabel” (akuntabilitas) berasal dari bahasa Latin “*accomptare*” yang artinya “mempertanggungjawabkan”, kata dasarnya “*computare*” artinya memperhitungkan, yang juga dari kata “*putare*” artinya mengadakan perhitungan. Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan menjadi “pertanggungjawaban”.

Dalam dokumen Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 bahwa Sararan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Sasaran Strategis BPKAD Kabupaten Tanah Laut**

No	Sasaran SKPD	Target Tahun	Satuan
----	--------------	--------------	--------

		Indikator Sasaran SKPD	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	Opini
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	100	100	100	Persen
3	Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	100	100	100	Persen
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	82	83	84	Nilai

Sumber Data : Renstra BPKAD 2024-2026

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian kinerja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 didasarkan atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dimana berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2024 telah tergambar tolak ukur dan target kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran.

Kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran 2024 yang telah tergambar dalam DPA-SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2024 itulah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja SKPD BPKAD Tahun 2024. Untuk menggambarkan Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan beserta target-targetnya serta keselarasan dengan Renstra SKPD dan juga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

No	Jabatan	Sasaran Strategi	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Kepala Badan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel,	Opini Laporan Keuangan Daerah	Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	WTP
		Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah, dan	Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD	$\frac{\text{Ketersediaan Kas Daerah sesuai dengan SPD}}{\text{Ketersediaan Kas Daerah}} \times 100\%$	100%
		Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	$\frac{\text{Penganggaran}}{\text{Perencanaan}} \times 100\%$	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	82
2	Sekretaris		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Komponen Perencanaan	24
				Nilai Komponen Pengukuran	24
				Nilai Komponen Pelaporan	12
				Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
				Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	87
3	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan		Terlaksananya pengendalian ketersediaan kas daerah sesuai SOP	Jumlah Tahapan Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan sesuai SOP	3

				Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%
4	Kepala Bidang Akuntansi	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan di OPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%
5	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Terwujudnya pengelolaan aset yang efektif	Meningkatnya kualitas perencanaan aset OPD sesuai kebutuhan	% OPD yang mengelola aset secara efektif/sesuai ketentuan pengelolaan aset yang di TL	100%
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Terwujudnya pengelolaan aset yang efektif	Meningkatnya kualitas perencanaan aset OPD sesuai kebutuhan	% OPD yang mengelola aset secara efektif/sesuai ketentuan	100%

Tabel perjanjian kinerja tahun 2024 seperti tergambar diatas telah sesuai dan telah tersaji pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan DPA dan setelah PERDA APBD Tahun 2024 ditetapkan. Sehingga terdapat kesesuaian antara tabel perjanjian kinerja secara keseluruhan dengan dokumen perjanjian kinerja seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan disesuaikan dengan target sasaran strategis yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD.

#### D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dalam upaya mencapai sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut menerapkan berbagai instrumen pendukung untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Instrumen ini meliputi program dan kegiatan yang terstruktur, pemanfaatan teknologi digital, optimalisasi pengelolaan aset, serta penguatan regulasi dan SDM. Dengan pendekatan ini, BPKAD berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan pelayanan publik. Adapun instrumen pendukung capaian kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Instrumen Pendukung Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut**

No.	Instrumen Pendukung	Uraian
1	Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang Terstruktur	BPKAD melaksanakan 3 program utama, 12 kegiatan, dan 57 sub-kegiatan yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2	Penguatan Regulasi dan Kebijakan	Penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran, termasuk Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan transparansi dan kepatuhan hukum.
3	Digitalisasi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-Payment, dan manajemen aset digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
4	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	Pemetaan dan pemanfaatan aset tidak produktif, penghapusan aset melalui lelang, serta pengawasan berbasis sistem digital untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aset.
5	Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Perencanaan anggaran berbasis data, optimalisasi kas daerah, dan monitoring realisasi anggaran untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
6	Penguatan SDM dan Kapasitas Aparatur	Pelatihan dan pengembangan pegawai, serta evaluasi kinerja berbasis indikator capaian yang jelas guna meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas.
7	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja yang Ketat	Audit internal dan eksternal, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Instrumen-instrumen ini berperan penting dalam mendukung **efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas** BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sedangkan instrumen pendukung capaian kinerja di Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2024, melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan rincian adalah sebagai berikut

**Tabel 2.5**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2024**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
<b>A</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		
1		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 4). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 6). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 7). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 8). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 9). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 10). Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</li> <li>2). Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah</li> <li>3). Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</li> <li>4). Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</li> <li>5). Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait</li> <li>6). Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</li> <li>7). Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</li> </ol>
3		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</li> <li>2). Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban</li> <li>3). Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</li> <li>4). Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>5). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</li> <li>6). Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</li> </ol>

4		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1). Sub Kegiatan Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan 2). Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		
1		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1). Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga 2). Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 3). Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 4). Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah 5). Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah 6). Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah 7). Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah 8). Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 9). Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 10). Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 11). Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
<b>C</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Perangkat Daerah	
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2). Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	1). Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2024 BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja tahun ke satu Renstra 2024-2026 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

## A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

### 1) Pencapaian Kinerja Sasaran Srategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 yang menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya di lingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 3.1**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) SKPD**

No.	Kinerja Utama/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung jawab / Sumber Data
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel, Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah, dan Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	BPKAD
		Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD	$\frac{\text{Ketersediaan Kas Daerah sesuai dengan SPD}}{\text{Ketersediaan Kas Daerah}} \times 100\%$	
		Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	$\frac{\text{Penganggaran}}{\text{Perencanaan}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD 2024**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024		PENJELASAN RUMUS	PENANGGUNGJAWAB / SUMBER DATA
			SATUAN	TARGET		
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel, Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah, dan Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
		Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	$\frac{\text{Ketersediaan Kas Daerah sesuai dengan SPD}}{\text{Ketersediaan Kas Daerah}} \times 100\%$	
		Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	$\frac{\text{Penganggaran}}{\text{Perencanaan}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD		Nilai	82	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten terhadap SAKIP SKPD	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Target indikator IKU pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut disajikan disesuaikan dengan target indikator yang telah disajikan pada dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Adapun capaian IKU Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD 2024**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024				PENJELASAN RUMUS	REALISASI	
			SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian			
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel, Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah, dan Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	1. Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%	Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual		
		2. Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	100%	$\frac{\text{Ketersediaan Kas Daerah sesuai dengan SPD}}{\text{Ketersediaan Kas Daerah}} \times 100\%$	2.897.946.343.634	X100
		3. Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	138,82	138,82%	$\frac{\text{Penganggaran}}{\text{Perencanaan}} \times 100\%$	2.897.946.343.634	X100
							2.087.672.343.526		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	82	82,85	101,04%	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten terhadap SAKIP SKPD		

Sumber Data : Opini BPK, LRA dan LHE

## **2) Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi**

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun terakhir cukup berhasil, tetapi bukan berarti sempurna, tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD yang juga adalah merupakan implementasi dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut diharapkan mewujudkan Tujuan dan Sasaran SKPD yang telah ditetapkan tersebut seperti yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Target indikator IKU pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut disajikan disesuaikan dengan target indikator yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD, dan pada Pohon Kinerja dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan target ini telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai Pimpinan SKPD. Sebagaimana telah disajikan pada tabel sebelumnya bahwa IKU SKPD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sasaran Strategis SKPD dan Kepala Badan mengemban Sasaran Strategis SKPD yang merupakan target perjanjian kinerja Kepala Badan. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas di bidangnya masing-masing walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari seluruh aparatur dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu sebanyak 43 PNS yang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 4 (empat) orang Pejabat Eselon III, 11 (sebelas) orang Pejabat Eselon IV, dan 27 (dua puluh tujuh) orang staf dan PPPK serta dibantu staf PTT sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya dengan didukung SDM yang berkualitas tersebut walaupun dengan segala keterbatasan jumlah yang tersedia namun tetap dapat melaksanakan target target kinerja dengan realisasi capaian kinerja 100%.

Adapun capaian kinerja tahun 2024 BPKAD kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sesuai RPD 2024-2026 dan IKU Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat digambarkan sebagai berikut :

**B.** Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan berkaitan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPD yang dilakukan dengan tujuan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPD pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, baik target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dan target IKU Kabupaten serta capaian IKU SKPD maupun IKU Kabupaten.

BPKAD sebagai SKPD penanggungjawab tujuan Kabupaten Tanah Laut No 20 yaitu Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja birokrasi berkualitas yaitu dengan sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat digambarkan dengan tabel sbb :

**Tabel 3.4**  
**TARGET INDIKATOR TUJUAN RPD TAHUN 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Target 2024	SKPD
20	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja birokrasi berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	66	BPKAD

Sumber Data : RPD 2024-2026

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 Permendagri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia dan menetapkan predikat terbaik secara nasional, dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia setiap tahunnya. Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah

tinggi, sedang dan rendah. Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah yang sama meliputi :

1. Peringkat Baik dengan Nilai A
2. Peringkat Perlu Perbaikan dengan nilai B
3. Peringkat Sangat Perlu Perbaikan dengan nilai C

Peran BPKAD dalam pengukuran IPKD disemua dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dimensi 1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
  - a. Kesesuaian program RPJMD & RKPD dipenuhi oleh Bappeda
  - b. Kesesuaian program RKPD & KUA PPAS dipenuhi oleh Bappeda dan BPKAD
  - c. Kesesuaian program KUA PPAS & APBD dipenuhi oleh BPKAD
  - d. Kesesuaian Pagu RKPD & KUA PPAS dipenuhi oleh Bappeda dan BPKAD
  - e. Kesesuaian Pagu KUA PPAS & APBD dipenuhi oleh BPKAD
2. Dimensi 2 Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
  - a. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan min 20% dari APBD
  - b. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan min 10% dari APBD, diluar gaji
  - c. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer min 25% dari DTU
  - d. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai perUUan
3. Dimensi 3 Transparansi Keuangan Daerah data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
  - Ketepatan waktu dan keteraksesan dipenuhi oleh BPKAD dan Diskominfo
4. Dimensi 4 Penyerapan Anggaran data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
  - Belanja Transfer daerah, Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dipenuhi oleh BPKAD

5. Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
- a. Kemandirian keuangan, dipenuhi oleh BPKAD
  - b. Solvabilitas jangka panjang dipenuhi oleh BPKAD
  - c. Fleksibilitas keuangan dipenuhi oleh BPKAD
  - d. Solvabilitas Layanan dipenuhi oleh BPKAD
  - e. Solvabilitas Operasional dipenuhi oleh BPKAD
  - f. Solvabilitas jangka pendek dipenuhi oleh BPKAD

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dimensi 5 adalah sbb :

- a. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah, maka disahkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui PP tersebut, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengumpulkan PAD melalui perluasan objek pajak daerah, retribusi daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, termasuk kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka setiap daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel. Pemberian kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat strateginya antara lain;
  1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak / Retribusi
  3. Memanfaatkan aset daerah untuk menghasilkan pemasukan
  4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak
  5. Mengembangkan sektor pariwisata

6. Meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pemungut pajak daerah/ Retda
7. Melakukan pemutakhiran/updating objek dan subjek Pajak baik melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
8. Melakukan kerja sama dengan pihak swasta atau LSM
9. Menyelenggarakan sistem digitalisasi penerimaan daerah.

Pengoptimalan lain-lain PAD yang sah perlu dilakukan oleh daerah karena tidak mempengaruhi langsung/membebani kehidupan masyarakat. Peluang yang masih dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup antara lain:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  2. hasil kerja sama daerah
  3. jasa giro;
  4. hasil pengelolaan dana bergulir
  5. pendapatan bunga;
  6. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  7. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  8. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  9. pendapatan denda pajak daerah;
  10. pendapatan denda retribusi daerah
  11. pendapatan dari pengembalian;
  12. pendapatan dari BLUD; dan
  13. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Kemudian terkait belanja pegawai kita telah berupaya menyusun perencanaan belanja yg memenuhi UU No 1 tahun 2022 dimana belanja pegawai harus 30% paling tinggi.
  - c. Terkait rendahnya solvabilitas layanan, kita terus berupaya memenuhi pendanaan utk pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan infrastruktur sesuai dengan UU No 1 tahun 2022.
  - d. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan manajemen kas dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam rangka menekan kewajiban lancar.

- e. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki kewajiban/hutang jangka panjang dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara financial mampu untuk membiayai belanja daerah.
6. Dimensi 6 Opini BPK atas LKPD data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
- Pengukuran dilakukan terhadap hasil opini BPK terhadap LKPD selama 3 tahun berturut-turut, dipenuhi oleh BPKAD.

Target Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 didalam RPD tahun 2024-2026 adalah sebesar 66. Bahwa telah ditetapkan / disampaikan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2023 sesuai surat pengantar dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3/6145/BSKDN tanggal 13 Desember 2024 perihal penyampaian Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil IPKD Tahun Anggaran 2023 tahun ukur 2024 dan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 mendapatkan Nilai Total **79,645** capaian realisasi sebesar **132%** atau dengan peringkat "**BAIK**" dan dengan Nilai "**A**" ranking ke 10 dari 105 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Tinggi". Dibandingkan dengan Kabupaten Tabalong di peringkat 14, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di peringkat 20 dan Kabupaten Kotabaru diperingkat 25, maka Kabupaten Tanah Laut menduduki peringkat yang terbaik yaitu ranking 10.

**Tabel 3.5**  
**REALISASI TUJUAN RPD TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Peringkat (Nilai)
20	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja birokrasi berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	66	79,645	132%	BAIK (A)

Sumber Data : KepMendagri No 900.1.15.3-387 thn 2023 dan No 900.1.15.3- 372 Thn 2024

Berikut adalah daftar hasil pengukuran IPKD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dan 2024 adalah sbb :

**Tabel 3.6**  
**Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Tahun	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
2023	13,771	19,138	15	15	2,921	15	80,83	Baik	A
2024	13,335	19,828	15	15	1,483	15	79,645	Baik	A

Sumber Data : KepMendagri No 900.1.15.3-387 thn 2023 dan No 900.1.15.3- 372 Thn 2024

Hasil penilaian Pengukuran Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 dan tahun 2024 rata-rata telah memperoleh Nilai BAIK (A), yaitu hasil Pengukuran Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat peringkat 4 untuk tahun 2022 tahun ukur 2023 dengan Nilai total 80,83 dengan Peringkat BAIK (A).

Sedangkan Hasil Pengukuran IPKD tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat peringkat 10 untuk tahun 2023 tahun ukur 2024 dengan Nilai total 79,645 dengan Peringkat BAIK (A), dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Pengukuran IPKD terdapat penurunan nilai pada Dimensi 1 pada tahun ukur 2024 dikarenakan kurangnya konsistensi kesesuaian pagu pada KUA-PPAS dengan APBD. Kemudian pada Dimensi 4 terdapat kurang maksimalnya serapan anggaran khususnya Belanja Tidak Terduga ( BTT ).

Kemudian pada Dimensi 5 terdapat beberapa catatan adanya penurunan nilai yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya Indeks kemandirian keuangan (strategi peningkatan PAD)
2. Rendahnya fleksibilitas keuangan ( strategi peningkatan PAD, mengurangi kewajiban lancar dan belanja pegawai)
3. Rendahnya solvabilitas layanan

4. Rendahnya solvabilitas jangka pendek (strategi peningkatan investasi jangka pendek dan menekan kewajiban lancar/jangka pendek)
5. Rendahnya solvabilitas jangka panjang (strategi peningkatan tidak mengandalkan hutang untuk menutupi belanja dan dalam pengajuan hutang menggunakan analisis yang matang agar tidak menjadi beban Pemda, solvabilitas bernilai NOL apabila asset tidak mengcover kewajiban jangka panjang).

Berdasarkan hasil penilaian serta catatan penyebab adanya penurunan nilai per Dimensi yang telah diuraikan diatas, maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut akan melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada masa ukur 2025 untuk IPKD penilaian tahun 2024.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak mengalami kendala dalam melaksanakan pemenuhan dan pengisian pada seluruh Dimensi. Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang terdapat konsistensi dan transparansi ke Pemerintah Daerah tentang penilaian pengukuran IPKD, sehingga Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja.

Namun untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang diharapkan untuk SDM aparatur PIC yang ditugaskan menangani pengisian dan pemenuhan data pengukuran IPKD ini diperlukan peningkatan pengembangan kapasitas dengan dibekali adanya Bimtek/Pelatihan Khusus dari Instansi terkait dan juga agar diperhatikan untuk diberikan reward apresiasi atas kinerjanya.

- a. Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 1 sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang juga merupakan IKU BPKAD nomor 1 ini dilaksanakan seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Belanja & Pembiayaan, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset dan Kepala Bidang Penatausahaan Aset ) beserta seluruh Kasubbid dibawahnya dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan berkaitan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, baik target IKU SKPD dan target IKU Kabupaten serta capaian IKU SKPD maupun IKU Kabupaten dapat dijelaskan dibawah ini.

Bahwa Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target WTP dan telah terealisasi dengan capaian WTP dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP oleh BPK RI atas LKPD tahun 2013 untuk yang pertama kali dengan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) mengungkapkan sebanyak 14 temuan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 7 temuan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 Laporan Keuangan SKPD Akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga masih berbasis Cash menuju akrual yang belum sepenuhnya berbasis Akrual.
- Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2014 untuk yang kedua kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan mengungkapkan sebanyak 4 temuan dengan bukti surat Nomor 8B/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015.
- Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD tahun 2015 untuk yang ketiga kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 9 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 temuan, dengan bukti surat Nomor 07.A/LHP/XIX.BJM/05/2016 dan Nomor 07.B/LHP/XIX.BJM/05/2016 serta Nomor 07.C/LHP/XIX.BJM/05/2016 tanggal 27 Mei 2016
- Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini dari BPK RI atas LKPD tahun 2016 untuk yang keempat kalinya dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 7 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 temuan, dengan bukti surat Nomor

12.A/LHP/XIX.BJM/05/2017 dan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.

- Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 untuk yang kelima kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 3 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 11.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018. sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk yang ketujuh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 10 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 temuan, bukti surat Nomor : 7.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan bukti surat Nomor : 7.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk yang kedelapan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 26 temuan, bukti surat Nomor : 12.A/LHP/IX.BJM/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk yang kesembilan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan dengan bukti surat Nomor : 5.B/LHP/XIX.BJM/05/2022 tanggal 13 Mei 2022, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 untuk yang kesepuluh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan dengan bukti surat Nomor : 9.B/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk yang kesebelas kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan dengan bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2024, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2024 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mencapai target tersebut dikarenakan adanya :

1. Komitmen Aparatur dan Pemangku Kepentingan

- a. Penguatan Komitmen Bebas Temuan dan Rekomendasi Pemeriksa pada Tahun 2015 dengan penandatanganan pakta integritas
  - b. Peningkatan Intensitas Koordinasi Internal dan Eksternal
2. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
    - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Pemda
    - b. Sistem Reward and Punishment
    - c. Penataan Organisasi dan Kelembagaan
  3. Sistem Informasi Keuangan Daerah
    - a. SIMDA-Keuangan dan Pendapatan (Simdang F-MIS) dan Aplikasi SIPD
    - b. SIMDA-BMD
  4. Kelengkapan Regulasi Daerah
  5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Melalui upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimis bisa mempertahankan Opini WTP selama semua dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut akan menuangkan action plan mempertahankan Opini WTP dalam sebuah Peraturan Bupati Tanah Laut.

Progres Action Plan/rencana aksi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Daerah telah mensosialisasikan tentang adanya regulasi terbaru berkaitan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada setiap pelaksanaan coffee morning untuk seluruh pimpinan SKPD.
2. Melakukan rapat koordinasi/penyamaan persepsi dengan Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
3. Dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Daerah (BPKAD) telah mengadakan pembinaan terhadap entitas akuntansi, sosialisasi regulasi, melaksanakan rekonsiliasi dan monitoring, melaksanakan FGD untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada Pemerintah Daerah.

4. Dalam menyamakan persepsi tentang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi serta BPK dan BPKP.
5. Bupati Tanah Laut telah menetapkan revisi Kebijakan Akuntansi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
6. Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset sudah membuat jaringan online berbasis website dengan menggunakan SIMDA-Keuangan dan Pendapatan ( Simdang F-MIS) dan Aplikasi SIPD.
7. Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian kode rekening secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
8. Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan setiap tahunnya bagi SPKD terbaik, Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
2. Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
4. Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.

5. Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrua dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
6. Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
7. Belum terintegrasi antara Aplikasi SIPD dengan Simda Keuangan FMIS dengan SIMDA BMD.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffe morning.
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dalam rangka mendukung penyusunan LKPD untuk penyediaan Data Dana BOS, Dana BOP dan Data DAK Fisik dan DAK Non Fisik secara tepat waktu dan dengan pihak BKD dalam hal pemerataan tenaga IT.
4. Melakukan Pembinaan entitas akuntansi,melaksanakan rekonsiliasi,monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
5. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
6. Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 1 ini yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab 4 (empat) Kepala Bidang dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan, Kepala Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Kepala Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan untuk membandingkan capaian WTP di Kabupaten Tanah Laut dengan capaian WTP di Provinsi Kalimantan Selatan serta capaian WTP secara Nasional di Kemendagri dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu bahwa capaian WTP secara Nasional di Kementrian Dalam Negeri telah mendapatkan Opini WTP 10 kali berturut turut sampai dengan tahun 2023, sedangkan capaian WTP di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan Opini WTP 9 kali berturut turut sampai dengan tahun 2022 sama dengan Kabupaten Tanah Laut yang telah mendapatkan Opini WTP 11 kali berturut turut sampai dengan tahun 2023, sehingga dengan demikian capaian kinerja telah tercapai 100% dan sampai dengan tahun Renstra 2024 ditargetkan akan tercapai 100% atau akan mempertahankan Opini WTP sampai tahun Renstra pada tahun 2024.

**C.** Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.

- Pada tahun 2018 penetapan APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2018 Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.
- Sedangkan pada tahun 2019 penetapan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD

Perubahan Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

- Pada tahun 2020 penetapan APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.
- Pada tahun 2021 penetapan APBD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2021 Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%.
- Pada tahun 2022 penetapan APBD Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2022 Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2022 Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%.
- Pada tahun 2023 penetapan APBD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%.

- Pada tahun 2024 penetapan APBD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 18 September 2024 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target Tahun RPD (2024) yaitu 100%.

**D. Sasaran Strategis Nomor 1 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel** dengan indikator Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%, dan pada Tahun 2023 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk yang ke 11 (sebelas) kalinya, sehingga dengan demikian bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam tahun Renstra BPKAD 2013-2018, tahun Renstra 2018-2023 dan Tahun Renstra 2024-2026, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mendukung sasaran IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta tanggungjawab Bidang Belanja & Pembiayaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset dan Bidang Penatausahaan Aset.

**E. Sasaran Strategis Nomor 2 Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah** dengan indikator Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD

telah mendapatkan nilai sebesar 100% yaitu dengan penjelasan bahwa Kas daerah dapat dipenuhi sesuai dengan surat penyediaan dana yang telah diterbitkan oleh BPKAD, sehingga dapat diyakini bahwa surat penyediaan dana yang terbit dipastikan dapat dipenuhi dengan Kas daerah yang tersedia dan dapat dipastikan belanja daerah terbayar pada tahun anggaran bersangkutan.

- F.** Sasaran Strategis Nomor 3 Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan dengan indikator Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan capaian kinerjanya melebihi mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 138,82%, yaitu dengan penjelasan bahwa penganggaran lebih besar dari pada perencanaan, hal ini disebabkan adanya Dana Alokasi Khusus, adanya tambahan Dana Intensif Fiskal, adanya tambahan DBH Sawit dan setelah adanya TKDD ada peluang untuk menambah volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang masih belum terakomodir alokasi anggaran pada RKPD, sehingga pada setiap tahun penganggaran tidak dapat diprediksi pada saat perencanaan karena ditahapan perencanaan Pemerintah kabupaten Tanah Laut telah menghitung kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas.
- G.** Sasaran Strategis Nomor 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD dengan indikator Nilai SAKIP BPKAD yang merupakan IKU Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 101,04 %, bahwa rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian SAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92% dan tahun 2019 adalah penilaian SAKIP Tahun 2018 sebesar 113,61%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah penilaian SAKIP Tahun 2019 sebesar 131,98%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah penilaian SAKIP Tahun 2020 sebesar 130,75% mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,23%. Pada tahun 2022 adalah penilaian SAKIP Tahun 2021 sebesar 116,67% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 14,08%. Pada tahun 2023 adalah penilaian SAKIP Tahun 2022 sebesar 116,43% mengalami penurunan dari tahun 2022. Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 4 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut telah dilaksanakan dengan baik.

Untuk menggambarkan tabel realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya yaitu berjumlah 4 Sasaran Strategis dengan 4 indikator sasaran dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam pembahasan ini akan dibandingkan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2022,2023 dan 2024 sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran serta penanggungjawabnya secara terinci dengan penjelasan berikut ini.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 yang telah ditetapkan adalah juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.7**

**TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD 2024**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024		PENJELASAN RUMUS	PENANGGUNGJAWAB / SUMBER DATA
			SATUAN	TARGET		
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel, Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah, dan Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruah</b>	<b>Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan &amp; Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut</b>
		Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	$\frac{\text{Ketersediaan Kas Daerah sesuai dengan SPD}}{\text{Ketersediaan Kas Daerah}} \times 100\%$	
		Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	$\frac{\text{Penganggaran}}{\text{Perencanaan}} \times 100\%$	
2	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD</b>		Nilai	82	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten terhadap SAKIP SKPD	<b>Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut</b>

Target indikator IKU pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut disajikan disesuaikan dengan target indikator yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD, dan pada Pohon Kinerja dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan target ini telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai Pimpinan SKPD. Sebagaimana telah disajikan pada tabel sebelumnya bahwa IKU SKPD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sasaran Strategis SKPD dan Kepala Badan mengemban Sasaran Strategis SKPD yang merupakan target perjanjian kinerja Kepala Badan, maka selanjutnya dapat dilihat realisasi yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan penjelasan yang lebih rinci pada pembahasan selanjutnya. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas di bidangnya masing-masing walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari seluruh aparatur dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu sebanyak 43 PNS yang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 4 (empat) orang Pejabat Eselon III, 11 (sebelas) orang Pejabat Eselon IV, dan 27 (dua puluh tujuh) orang staf dan PPPK serta dibantu staf PTT sebanyak 19 (sembilan belas) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya dengan didukung SDM yang berkualitas tersebut walaupun dengan segala keterbatasan jumlah yang tersedia namun tetap dapat melaksanakan target target kinerja dengan realisasi capaian kinerja 100%.

Tabel 3.8

**Realisasi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2024  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
				2024	2024	2024				2024	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	66 (PB)	79,645 (BAIK)	120,68%	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	100%
							Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	100%
							Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	138,82	138,82%
2	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten		70.1 (BB)	70.16 (BB)	100,09%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	82	82,85%	101,04%

Realisasi tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat baik, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditargetkan pada nilai 66 berhasil melampaui ekspektasi dengan realisasi 79,645, mencapai 120,68% dari target. Keberhasilan ini diperkuat dengan capaian opini WTP pada laporan keuangan daerah, ketersediaan kas daerah yang stabil sesuai dengan SPD (100%), serta tingkat kesesuaian penganggaran dengan perencanaan yang mencapai 138,82% dari target awal. Selain itu, peningkatan akuntabilitas kinerja juga menunjukkan hasil positif dengan nilai SAKIP Kabupaten mencapai

70,16 (100,09% dari target) dan nilai SAKIP BPKAD yang melampaui target dengan realisasi 82,85 (101,04%). Capaian ini mencerminkan efektivitas tata kelola keuangan dan kinerja BPKAD yang semakin baik dalam mendukung transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 3.9**  
**Tabel Pencapaian Tujuan Strategis 1 ( Kepala BPKAD )**  
**Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Tujuan Strategis	No	Indikator Tujuan	Satuan	Data Awal Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
						Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	49,38(SPP)	61 (PB)	80,83 (BAIK)	132,51%	66 (PB)	79,645 (BAIK)	120,68%
			Rata-rata capaian kinerja		49,38(SPP)			132,51%			120,68%

Sumber data : RPD 2024-2026 dan Hasil Pengukuran IPKD dari Kemendagri

Tabel 3.9 pencapaian tujuan strategis 1 menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2022 hingga 2024. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) mengalami kenaikan dari 49,38 (SPP) pada tahun 2022 menjadi 80,83 (Baik) pada tahun 2023, melampaui target 61 (PB) dengan capaian 132,51%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana IPKD ditargetkan mencapai 66 (PB) dan terealisasi di angka 79,645 (Baik) dengan capaian 120,68%. Rata-rata capaian kinerja juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, menandakan efektivitas strategi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan ini mencerminkan perbaikan dalam transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas keuangan daerah, sebagaimana diukur oleh Kemendagri melalui IPKD.

**Tabel 3.10**  
**Tabel Pencapaian Tujuan Strategis 2 ( Kepala BPKAD )**  
**Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel**

No	Tujuan Strategis	No	Indikator Tujuan	Satuan	Data Awal Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
						Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	67.28 (B)	70,01 (BB)	67.52 (BB)	96,44%	70.01 (BB)	70.16 (BB)	100,22%
			Rata-rata capaian kinerja		67.28 (B)			96,44%			100,22%

Sumber Data : Hasil Penilaian dari Menpan RB

Tabel 3.10 mengenai pencapaian tujuan strategis 2 (Kepala BPKAD) menunjukkan capaian kinerja dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui pengukuran Nilai SAKIP Kabupaten. Pada tahun 2022, nilai SAKIP berada pada kategori B dengan angka 67,28, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan realisasi 67,52 (BB), meskipun masih berada di bawah target 70,01 (BB) dengan capaian 96,44%. Pada tahun 2024, target tetap ditetapkan pada 70,01 (BB) dan berhasil direalisasikan sedikit lebih tinggi, yaitu 70,16 (BB) dengan capaian 100,22%. Rata-rata capaian kinerja mengalami peningkatan dari 96,44% pada tahun 2023 menjadi 100,22% pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, keberhasilan mencapai target pada tahun

2024 mencerminkan efektivitas kebijakan serta komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.

**Tabel 3.11**  
**Tabel Pencapaian Sasaran Strategis 1 ( Kepala BPKAD)**  
**Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	1	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00

Sumber Data : Opini BPK RI

Tabel 3.11 menunjukkan pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel melalui indikator Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2022, 2023, dan 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan capaian kinerja 100% setiap tahunnya. Rata-rata capaian kinerja juga konsisten di angka 100%, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan

daerah telah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan oleh BPK RI. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip akuntansi pemerintahan, serta komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan yang baik dan akuntabel.

**Tabel 3.12**  
**Tabel Pencapaian Sasaran Strategis 2 (Kepala BPKAD)**  
**Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023				Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
					Target			Realisasi		Target			Realisasi	
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	2	Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD	%	100			100	100,00%	100			100	100,00%
						<u>2.259.475.998.716</u> 2.259.475.998.716	x100			<u>2.897.946.343.634</u> 2.897.946.343.634	x100			
			Rata-rata capaian kinerja					100%					100%	

Sumber Data : Dokumen Kas Daerah dan Dokumen SPD

Tabel 3.12 menunjukkan pencapaian sasaran strategis dalam meningkatkan sistem pengendalian ketersediaan kas daerah dengan indikator persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan Surat Penyediaan Dana (SPD). Pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 100%, dan berhasil direalisasikan dengan capaian 100%, dengan nilai kas daerah sebesar Rp2.259.475.998.716. Pada tahun 2024, target tetap dipertahankan di angka 100%, dan kembali terealisasi sepenuhnya dengan capaian 100%, di mana nilai kas daerah meningkat menjadi Rp2.897.946.343.634. Rata-rata capaian kinerja selama dua tahun berturut-turut tetap 100%, yang menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan dan pengendalian kas daerah. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam

memastikan ketersediaan kas sesuai dengan kebutuhan belanja daerah, yang berkontribusi terhadap kelancaran operasional pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 3.13**  
**Tabel Pencapaian Sasaran Strategis 3 ( Kepala BPKAD)**  
**Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023				Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024				Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		
					Target			Realisasi		Target			Realisasi			
3	Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	3	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100			93,71	93,71%	100			138,82	138,82%		
							<u>2.259.475.998.716</u>				X100				<u>2.897.946.343.634</u>	X100
							2.411.267.702.392								2.087.672.343.526	
			Rata-rata capaian kinerja					93,71%					138,82%			

Tabel 3.13 menggambarkan pencapaian sasaran strategis dalam meningkatkan kesesuaian penganggaran dengan perencanaan berdasarkan persentase penganggaran yang sesuai dengan perencanaan. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 100%, namun realisasi hanya mencapai 93,71%, menunjukkan adanya sedikit ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang terealisasi bahwa penganggaran lebih besar dari pada perencanaan, hal ini disebabkan adanya Dana Alokasi Khusus, adanya tambahan Dana Intensif Fiskal, adanya tambahan DBH Sawit dan setelah adanya TKDD ada peluang untuk menambah volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang masih belum terakomodir alokasi anggaran pada RKPD, sehingga pada setiap tahun penganggaran tidak dapat diprediksi pada saat perencanaan karena ditahapan perencanaan Pemerintah

kabupaten Tanah Laut telah menghitung kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam pencapaian, di mana realisasi kesesuaian penganggaran mencapai 138,82%, melebihi target yang ditetapkan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya optimalisasi dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga mampu menyesuaikan kebutuhan keuangan daerah secara lebih fleksibel dan akurat. Rata-rata capaian kinerja juga menunjukkan lonjakan dari 93,71% di tahun 2023 menjadi 138,82% di tahun 2024, yang menandakan perbaikan dalam sistem perencanaan dan eksekusi anggaran di Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 3.14**  
**Tabel Pencapaian Sasaran Strategis 4 (Kepala BPKAD)**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	4	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	70	81,50	116,43%	82	82,85	101,04%
			Rata-rata capaian kinerja				116,43%			101,04%

Sumber Data : LHE dari Inspektorat Tahun 2022-2024

Tabel 3.14 menunjukkan pencapaian sasaran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja BPKAD, yang diukur melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPKAD. Pada tahun 2023, target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah 70, namun realisasi mencapai 81,50, menghasilkan capaian 116,43%, yang menunjukkan kinerja melampaui target yang direncanakan. Pada tahun 2024, target nilai SAKIP dinaikkan menjadi 82, dan realisasi mencapai 82,85, dengan capaian 101,04%. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja BPKAD, meskipun persentase capaian sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pencapaian ini mencerminkan keberhasilan BPKAD dalam memperbaiki sistem akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **3). Analisa Keberhasilan/Kegagalan, Hambatan dan Langkah-Langkah Antisipasi Yang Diambil**

#### **1. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2024 ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah ditanggulangi dalam rangka kelancaran dan penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

- a) Belanja hibah dan bantuan social , penerima hibah belum begitu memahami hak dan kewajiban penerima hibah , termasuk sekolah – sekolah wasta
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan Dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan kepada Desa maupun Partai Politik juga sudah berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut, kendala yang sering dihadapi adalah kurang pemahamnya aparat desa tentang siskeudes dan laporan pertanggung jawaban.
- d). Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.
- e). Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
- f). Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- g). Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
- h). Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.

- i). Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
  - j). Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
  - k). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan dan kurangnya SDM.
  - l). Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam penertiban maupun pengamanan aset daerah.
  - m). Lambatnya penyelesaian proses penyertifikatan dari instansi terkait.
  - n). Kurangnya kerjasama SKPD terkait maupun pihak ketiga dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan BMD.
- a. Upaya Pemecahan Masalah
- 1) Melayani Organisasi dan masyarakat yang konsultasi tentang hibah dan bantuan sosial
  - 2) Menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut agar mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada calon penerima hibah
  - 3) Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa khususnya terkait penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan serta memberikan arahan pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.
  - 4) Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait, serta mengalokasikan waktu yang memadai untuk setiap tahapan

- 5) Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffe morning.
- 6) Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 7) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
- 8) Melakukan Pembinaan entitas akuntansi,melakanakan rekonsiliasi,monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 9) Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
- 10).Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
- 12).Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 13).Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 14).Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian proses penyertifikatan maupun pembuatan duplikat BPKB .
- 15).Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mewujudkan tujuan SKPD dalam menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan SDM aparatur yang handal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih menggunakan narasumber/tenaga ahli dari luar. disamping itu, dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset sangat tergantung inputnya dari

setiap SKPD lain di lingkungan Pemkab. Tanah Laut, dimana rata-rata SKPD dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan aset masih belum begitu terlatih. Solusi yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak – pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

## **2. Keberhasilan / kegagalan**

Adapun dalam rangka peningkatan kinerja Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut membuat strategi dengan mengeluarkan inovasi SKPD pada tahun 2024 untuk membantu peningkatan pelayanan yaitu sebagai berikut :

1. Aplikasi SIMPKB (Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor) sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2021 tentang Aplikasi Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (SIM PKB) sebagai inovasi pelayanan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, inovasi ini dikeluarkan dengan latar belakang adanya keterlambatan dan kesalahan SKPD pada saat pengajuan permohonan memperpanjang masa pajak kendaraan dinas operasional, sehingga dengan adanya Aplikasi ini membantu mempercepat proses serta dalam hal koordinasi karena telah diinput oleh masing-masing SKPD sehingga kemungkinan keterlambatan dan kesalahan akan sangat kecil.
2. Aplikasi E-Kasda sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penyediaan Data dan Informasi Kas Daerah Secara Elektronik pada Bidang Akuntansi, inovasi ini dikeluarkan dengan latar belakang Laporan Posisi Kas Bulanan merupakan salah satu Laporan yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya yang harus disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan terdapat sanksi adanya penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil apabila terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan. Di samping itu juga adanya permintaan dari Inspektorat kepada Subbid Akuntansi Pendapatan dan

Pengelolaan Kas atas Laporan Saldo Kas Daerah setiap tanggal 15 setiap bulannya sebagai bahan pengendalian dan pengawasan dan juga permintaan bukti rekening Koran atas setoran pengembalian kerugian daerah yang disyaratkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pemantauan penyelesaian kerugian daerah setiap semester. Semua laporan yang diminta oleh instansi tersebut semuanya masih bersifat manual. Aplikasi e-Kasda menampilkan data rekening koran harian dari Kas Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana terdapat informasi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam aplikasi e-Kasda ini juga terdapat grafik mutasi debit dan kredit dan saldo akhir harian kas daerah. Dalam menu Laporan Posisi Kas menampilkan Laporan Posisi Kas Kabupaten Tanah Laut. Aplikasi ini bisa diakses oleh admin dan user yang telah mendapatkan hak akses.

3. Sistem Informasi Inventarisasi Data Aset (SIFINDA) sesuai Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah melalui Aplikasi pada Bidang Penatausahaan Aset, inovasi ini dikeluarkan atas latar belakang Inventarisasi BMD dilakukan secara manual (kertas kerja) sehingga ada keterlambatan mengetahui jenis BMD dan tidak semua orang mengetahui kode barang selain Pengurus Barang, Dengan adanya Aplikasi SIFINDA ini mempermudah, mempercepat pelaksanaan Inventarisasi BMD tepat guna dan efektif dalam prosesnya dan untuk meningkatkan kinerja.
4. Sistem Informasi Laporan Keuangan (SILKEU) sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Secara Elektronik pada Bidang Akuntansi, inovasi ini dikeluarkan karena selama ini Laporan Keuangan SKPD disampaikan melalui email tidak diketahui sudah apa belum SKPD menyampaikan dan hanya di ceklist satu persatu serta tidak diketahui tanggal masuk penyampaiannya, Aplikasi SILKEU Laporan Keuangan SKPD lebih tertib secara otomatis dan dapat diketahui SKPD yang menyampaikan tepat waktu dan secara lengkap, Aplikasi SILKEU membatasi waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya, sehingga apabila SKPD melebihi batas waktu penyampaian akan diberikan surat teguran keterlambatan, kecuali SKPD membuat Surat Permohonan.
5. Mekanisme Pembayaran Gaji Bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD Lingkup Pemkab Tanah Laut sesuai Peraturan Bupati Tanah

Laut Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pembayaran Gaji Dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya pada Bidang Belanja dan Pembiayaan , inovasi ini dikeluarkan karena selama ini tanggal gajian apabila tanggal 1 bertepatan tanggal merah atau liburan maka gajian bisa sampai tanggal 2, 3, 4 bahkan tanggal 5, sehingga dengan dikeluarkannya Perbup tentang ini maka sekarang walaupun tanggal 1 bertepatan liburan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tetap dapat melakukan pembayaran Gaji bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN dan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sehingga dengan adanya inovasi-inovasi yang dibuat setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kinerja di Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi di bidang Pelayanan Publik.

Kemudian kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 telah mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

1. Menerima Opini WTP yang Ke 11 atas LKPD tahun 2023 dari BPK RI
2. Menerima Penghargaan sebagai Perangkat Daerah Terbaik I Tahun 2024
3. Menerima Penghargaan sebagai Pelaksanaan Percepatan Pelayanan TASPEN bagi Peserta PT.TASPEN (Persero) KC Banjarmasin.
4. Menerima Penghargaan Juara III Putri Angrek Tingkat SKPD/Instansi Se kabupaten Tanah Laut pada Tanah Laut Orchid Progress yang diselenggarakan oleh Nasional Borneo Orchid Show ke 15.
5. Menerima Penghargaan BEST FULL COLOUR pada Tanah Laut Orchid Progress yang diselenggarakan oleh Nasional Borneo Orchid Show ke 15.

Sehingga dengan telah diraihnya berbagai penghargaan tersebut merupakan apresiasi terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehingga berdampak ke internal untuk mendorong SDM Aparatur SKPD lebih meningkatkan lagi kinerjanya menjadi semakin lebih baik.

### **3. Upaya Efisiensi BPKAD Kabupaten Tanah Laut**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan berbagai langkah efisiensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya utama adalah digitalisasi sistem akuntansi, pelaporan, serta pembayaran, yang tidak hanya

mempercepat proses administrasi tetapi juga mengurangi penggunaan kertas dan biaya operasional. Selain itu, pengelolaan kas daerah dilakukan lebih optimal untuk mencegah dana mengendap tanpa pemanfaatan yang jelas.

Dalam pengelolaan aset, BPKAD melakukan pemetaan untuk memastikan aset daerah digunakan secara maksimal. Gedung dan fasilitas yang sebelumnya tidak produktif kini disewakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan yang berasal dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BPKAD pada tahun 2024 dari target sebesar Rp297.382.444 telah terealisasi sebesar Rp426.891.510 atau sebesar 143,55%, sementara penilaian aset baik untuk penjualan/lelang maupun yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain/sewa dan aset yang sudah tidak layak pakai akan dilelang dalam rangka menghemat biaya perawatan sekaligus menambah pemasukan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, sistem monitoring aset berbasis digital diterapkan untuk mencegah kehilangan dan kerusakan, sehingga biaya perbaikan dapat ditekan secara signifikan.

Efisiensi juga diterapkan dalam kegiatan sekretariat, di mana proses perencanaan dan pelaporan dilakukan secara elektronik untuk mempercepat penyusunan dokumen dan mengurangi biaya operasional. Pengelolaan keuangan berbasis digital membantu memperlancar pencairan anggaran, sementara optimalisasi manajemen SDM dan perjalanan dinas memastikan pengeluaran tetap terkendali.

Dengan langkah-langkah ini, BPKAD tidak hanya menghemat miliaran rupiah tetapi juga memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah. BPKAD Kabupaten Tanah Laut akan terus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam tata kelola keuangan dan aset daerah, sehingga setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Rencana Kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang sudah ditentukan.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Sesuai pilihan prioritas rencana kinerja tahunan BPKAD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah Instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besar pencapaian target – target yang ditetapkan.

Rencana-rencana yang telah ditetapkan selanjutnya diaplikasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD). Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tentunya haruslah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, penatausahaan/pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1). Anggaran dan Realisasi APBD BPKAD 2024**

Ringkasan realisasi APBD khusus untuk SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut realisasi belanjanya pada Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Target dan Realisasi Belanja BPKAD sebagai SKPD**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selain sebagai SKPD juga sebagai Pejabat Pengelola keuangan Daerah PPKD

yang bertugas sebagai koordinator dan membina 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 321.447.398.435,- setelah perubahan adalah sebesar Rp 331.262.636.438,- yaitu bertambah sebesar Rp 9.815.238.003,- dengan realisasi pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp 298.951.078.925,-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 90,25 %. dengan capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 100%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,75% dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut :

#### **a). Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Operasi dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 21.368.815.542,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.805.092.513,- atau capaian 88,00% dengan rincian anggaran perjenis belanja sebagai berikut :

##### **1. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 anggaran sebesar Rp 8.884.047.173,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.265.430.525,- atau capaian sebesar 93,04%.

##### **2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 12.484.768.369,- ini terealisasi sebesar Rp. 10.539.661.988,- atau capaian 84,42%.

#### **b) . Belanja Modal**

Belanja Modal dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 10.233.274.326,- ini telah terealisasi sebesar Rp. 9.185.037.400,- dengan capaian 89,76% rincian per jenis belanja sebagai berikut :

##### **1. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 882.000,- atau capaian 0,59%.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 9.558.859.335,- terealisasi sebesar Rp. 8.671.741.000,- atau capaian 90,72%.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 499.439.991,- terealisasi sebesar Rp. 489.914.400,- atau capaian 98,09%.

4. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 24.975.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.500.000,- atau capaian 90,09%.

**c) Belanja Tidak Terduga.**

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak anggaran tidak dapat diprediksi sebelumnya atau tidak terencana.

Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 29.219.255.758,- telah terealisasi sebesar Rp. **887.762.000,-** atau capaian 3,04%.

**d). Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Transfer dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 270.441.290.812,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 270.073.187.012,- atau capaian sebesar 99,86% dengan rincian anggaran per jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil untuk pemerintah desa dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 6.071.025.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp 6.071.025.100,- atau capaian sebesar 100%.

## 2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan untuk pemerintah desa dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 264.370.265.712,- dan telah terealisasi sebesar Rp 264.002.161.912 ,- atau capaian sebesar 99,86%.

### **Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sesuai Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menutupi dari pembiayaan neto karena SILPA lebih besar dari pengeluaran pembiayaan daerah.

Dalam rancangan APBD Tahun anggaran 2024 ini penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 864.623.610.237,- penerimaan pembiayaan daerah itu masih berupa perkiraan mengingat tahun anggaran 2024 masih berjalan, namun pada akhir periode telah terealisasi sebesar Rp 865.186.610.237,06 atau dengan capaian sebesar 100,07%.

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi, karena dalam Rancangan Peraturan daerah kabupaten tanah laut tentang APBD Tahun Anggaran 2024 anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.132.799.482.448,- masih lebih kecil dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.897.946.343.634,15 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 766.146.861.186,-.

a. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ini dianggarkan sebesar Rp. 0,- (NIHIL), kemudian Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp 864.623.610.237,- telah terealisasi sebesar Rp 865.186.610.237,- atau dengan capaian 100,07%.

Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Mengambil langkah dimana defisit anggaran yang terjadi akan ditutupi dengan pembiayaan neto.

Hal ini karena adanya kebijakan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya untuk menandai belanja, terutama untuk membiayai program dan kegiatan yang dirasa cukup penting untuk dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

## **2). Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program**

Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2024 pada umumnya sudah tercapai dan sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi keuangan dan fisik APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2024 berdasarkan Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2024**

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran DPA (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran
				Fisik		Keuangan s.d Desember		Rp
				Kinerja	%	Rp	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>15.482.483.408,00</b>		100%	<b>14.383.115.764,00</b>	92,90	<b>1.099.367.644</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	13 dokumen	17.993.125,00	13 dokumen	100%	14.987.185,00	83,29	3.005.940
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )	6 dokumen	8.495.277,00	6 dokumen	100%	7.080.900,00	83,35	1.414.377
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ( )	6 laporan	9.497.848,00	6 laporan	100%	7.906.285,00	83,24	1.591.563

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)</b>	<b>57 orang 12 bulan, 94 dokumen</b>	<b>8.898.041.363,00</b>	<b>57 orang 12 bulan, 94 dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>8.275.842.825,00</b>	<b>93,01</b>	<b>622.198.538</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	57/ 12 bulan	8.884.047.173,00	57/ 12 bulan	100%	8.265.430.525,00	<b>93,04</b>	<b>618.616.648</b>
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	94 dokumen	13.994.190,00	94 dokumen	100%	10.412.300,00	<b>74,40</b>	<b>3.581.890</b>
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*) (%)</b>	<b>2 paket</b>	<b>46.897.500,00</b>	<b>2 paket</b>	<b>100%</b>	<b>39.650.000,00</b>	<b>84,55</b>	<b>7.247.500</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	46.897.500,00	1 paket	100%	39.650.000,00	<b>84,55</b>	<b>7.247.500</b>

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0 Orang	0,00	0 Orang	100%	0,00	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)</b>	<b>14 jenis, 240 kali</b>	<b>3.851.523.618,00</b>	<b>14 jenis, 240 kali</b>	<b>100%</b>	<b>3.663.876.964,00</b>	<b>95,13</b>	<b>187.646.654</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	1 paket	7.496.501,00	1 paket	100%	6.747.000,00	90,00	749.501
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	20 paket	1.269.276.661,00	20 paket	100%	1.107.095.400,00	87,22	162.181.261
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*)	9 paket	9.980.749,00	9 paket	100%	8.845.000,00	88,62	1.135.749

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	5 paket	49.999.844,00	5 paket	100%	42.572.400,00	85,15	7.427.444
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 laporan	1.975.000.000,00	300 laporan	100%	1.968.127.164,00	99,65	6.872.836
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	514.794.863,00	3 Dokumen	100%	507.990.000,00	98,68	6.804.863
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	24.975.000,00	1 Dokumen	100%	22.500.000,00	90,09	2.475.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>1.609.903.405,00</b>		100%	<b>1.513.733.000,00</b>	<b>94,03</b>	<b>96.170.405</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	99.900.000,00	4 Unit	100%	89.908.000,00	90,00	9.992.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	92 Unit	285.930.450,00	92 Unit	100%	273.095.000,00	95,51	12.835.450

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	1.224.072.955,00	55 Unit	100%	1.150.730.000,00	94,01	73.342.955
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0 Unit	100%	0,00	-	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>24 laporan</b>	<b>803.327.397,00</b>	<b>24 laporan</b>	<b>100%</b>	<b>653.812.590,00</b>	<b>81,39</b>	<b>149.514.807</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	311.650.185,00	12 laporan	100%	184.492.243,00	59,20	127.157.942
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 laporan	491.677.212,00	12 laporan	100%	469.320.347,00	95,45	22.356.865
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pemeliharaan BMD kantor BPKAD (unit)</b>	<b>79</b>	<b>254.797.000,00</b>	<b>79</b>	<b>100%</b>	<b>221.213.200,00</b>	<b>86,82</b>	<b>33.583.800</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	35.000.000,00	1 unit	100%	21.460.300,00	61,32	13.539.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 unit	58.500.000,00	15 unit	100%	57.766.900,00	98,75	733.100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	61 unit	39.297.000,00	61 unit	100%	24.515.000,00	62,38	14.782.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara direhabilitasi	2 unit	122.000.000,00	2 unit	100%	117.471.000,00	96,29	4.529.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>301.451.519.756,00</b>		<b>100%</b>	<b>272.519.462.504,00</b>	<b>90,40</b>	<b>28.932.057.252</b>

<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah (Dokumen)</b>	<b>13 dokumen, 40 SKPD</b>	<b>644.849.376,00</b>	<b>13 dokumen, 40 SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>524.909.067,00</b>	<b>81,40</b>	<b>119.940.309</b>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	43.458.740,00	2 dokumen	100%	39.682.160,00	<b>91,31</b>	<b>3.776.580</b>
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang disusun	2 dokumen	43.350.337,00	2 dokumen	100%	29.687.850,00	<b>68,48</b>	<b>13.662.487</b>
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	15.990.844,00	40 dokumen	100%	14.620.884,00	<b>91,43</b>	<b>1.369.960</b>
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	15.998.398,00	40 dokumen	100%	11.878.400,00	<b>74,25</b>	<b>4.119.998</b>
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	1.299.762,00	40 dokumen	100%	1.167.276,00	<b>89,81</b>	<b>132.486</b>

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang di verifikasi	40	dokumen	3.999.118,00	40	dokumen	100%	640.582,00	<b>16,02</b>	<b>3.358.536</b>
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	254.998.249,00	2	dokumen	100%	219.655.865,00	<b>86,14</b>	<b>35.342.384</b>
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	dokumen	234.759.110,00	2	dokumen	100%	186.042.185,00	<b>79,25</b>	<b>48.716.925</b>
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	dokumen	30.994.818,00	5	dokumen	100%	21.533.865,00	<b>69,48</b>	<b>9.460.953</b>

<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah</b>	<b>76 Dok, 82 Org</b>	<b>147.455.552,00</b>	<b>76 Dok, 82 Org</b>	<b>100%</b>	<b>126.632.852,00</b>	<b>85,88</b>	<b>20.822.700</b>
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	168 dokumen	7.269.045,00	168 dokumen	100%	6.057.352,00	83,33	1.211.693
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 dokumen	46.918.516,00	2 dokumen	100%	41.192.500,00	87,80	5.726.016
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 dokumen	14.469.379,00	4 dokumen	100%	11.230.000,00	77,61	3.239.379

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 dokumen	13.898.250,00	2 dokumen	100%	11.553.000,00	83,13	2.345.250
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	82 orang	64.900.362,00	82 orang	100%	56.600.000,00	87,21	8.300.362
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>26 dokumen, 2 FGD</b>	<b>998.668.258,00</b>	<b>26 dokumen, 2 FGD</b>	<b>100%</b>	<b>906.971.573,00</b>	<b>90,82</b>	<b>91.696.685</b>

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7 laporan	149.990.000,00	7 laporan	100%	144.091.780,00	<b>96,07</b>	<b>5.898.220</b>
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	4 dokumen	154.995.096,00	4 dokumen	100%	144.849.700,00	<b>93,45</b>	<b>10.145.396</b>
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	8 laporan	210.441.265,00	8 laporan	100%	177.204.700,00	<b>84,21</b>	<b>33.236.565</b>
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 laporan	149.977.185,00	4 laporan	100%	148.666.510,00	<b>99,13</b>	<b>1.310.675</b>

	yang Terkonsolidasi (Laporan)									
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	dokumen	218.298.551,00	6	dokumen	100%	187.078.455,00	<b>85,70</b>	<b>31.220.096</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12	dokumen	39.966.795,00	12	dokumen	100%	37.764.528,00	<b>94,49</b>	<b>2.202.267</b>

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	120 Orang	74.999.366,00	Orang	100%	67.315.900,00	89,76	7.683.466
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>130 desa , 1 dokumen</b>	<b>299.660.546.570,00</b>	<b>130 desa , 1 dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>270.960.949.012,00</b>	<b>90,42</b>	<b>28.699.597.558</b>
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	130 Laporan	270.441.290.812,00	130 Laporan	100%	270.073.187.012,00	99,86	368.103.800
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	29.219.255.758,00	1 Laporan	100%	887.762.000,00	3,04	28.331.493.758
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD</b>	<b>14.328.633.274,00</b>	<b>42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>12.047.845.257,00</b>	<b>84,08</b>	<b>2.280.788.017</b>

<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Presentase capaian pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD</b>	<b>14.328.633.274,00</b>	<b>42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>12.047.845.257,00</b>	<b>84,08</b>	<b>2.280.788.017</b>
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	79.999.243,00	1 dokumen	100%	40.863.600,00	<b>51,08</b>	<b>39.135.643</b>
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 dokumen	4.938.852.811,00	41 dokumen	100%	4.141.507.053,00	<b>83,86</b>	<b>797.345.758</b>
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	44.997.739,00	1 dokumen	100%	23.430.000,00	<b>52,07</b>	<b>21.567.739</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	16 Laporan	540.358.382,00	16 Laporan	100%	454.711.106,00	<b>84,15</b>	<b>85.647.276</b>
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1 Laporan	61.474.656,00	1 Laporan	100%	23.021.600,00	<b>37,45</b>	<b>38.453.056</b>

Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Iporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	Laporan	792.157.978,00	3	Laporan	100%	413.152.460,00	<b>52,16</b>	<b>379.005.518</b>
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	136.684.658,00	4	Laporan	100%	111.966.000,00	<b>81,92</b>	<b>24.718.658</b>
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	7.485.470.831,00	2	Laporan	100%	6.620.826.638,00	<b>88,45</b>	<b>864.644.193</b>
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah serta dokumen sosialisasi	8	dokumen	99.999.527,00	8	dokumen	100%	92.555.950,00	<b>92,56</b>	<b>7.443.577</b>
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	17.639.564,00	8	Laporan	100%	17.605.200,00	<b>99,81</b>	<b>34.364</b>

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus brang yang diberi pembinaan pengelolaan BMD	367 orang	130.997.885,00	367 orang	100%	108.205.650,00	82,60	22.792.235
<b>JUMLAH</b>			<b>331.262.636.438</b>		100%	<b>298.950.423.525</b>	<b>90,25</b>	<b>32.312.212.913</b>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 321.447.298.435,- setelah perubahan adalah sebesar Rp 331.262.636.438,- dengan realisasi pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp 298.951.078.925,-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 90,25 %. dengan capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 100%,

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL REALISASI RENCANA KERJA SESUAI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN			TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	ANGGARAN (RP)		REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN					TERKAIT	TIDAK/TERKAIT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24
1.	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%																
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	100%	100%	100%																





							Mengin gatkann ya kualitas usulan alokasi belanja Perangk at Daerah sesuai dengan target kinerja OPD	Jumlah OPD yang alokasi belanjanya sesuai dengan target kinerjanya	Ya		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perkada Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Ya	234.759.110,00	Terkait	186.042.185,00	79,25
							Mengin gatkann ya ketepatan kapasitas real kemampuan keuangan/proyeksi penerimaan tahun rencana	Tingkat ketepatan kapasitas real keuangan daerah yang dianalisis	Ya		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Pedoman Penyusunan RKA SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Ya	30.994.818,00	Terkait	21.533.865,00	69,48
										2	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pemenuhan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah								
											Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen SPD	480 Dokumen	480 Dokumen			7.269.045,00		6.057.352,00	







										an APBD Bulanan, Triwulana n dan Semester n		dan Semester an											
										Konsolida si Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah	Pemerint ah Kabupate n Tanah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolid asi	7 Dokume n	7 Dokume n	100%	Ya	149.977.185,00	Terkai t	148.666.510, 00	99, 13			
										Koordinasi dan Penyusun an Rancanga n Peraturan Daerah tentang Pertanggu ngjawab an Pelaksana an APBD Provinsi dan Rancanga n Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabara n Pertanggu ngjawab an	Pemerint ah Kabupate n Tanah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/ Kota	3 Dokume n	3 Dokume n	100%	Ya	218.298.551,00	Terkai t	187.078.455, 00	85, 70			



									Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 Dokumen	41 Dokumen	100%	Ya	4.938.852.811,00	Terkait	4.141.507.053,00	83,86
									Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			44.997.739,00		23.430.000,00	
									Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	16 Laporan	16 Laporan	100%	Ya	540.358.382,00	Terkait	454.711.106,00	84,15
									Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1 Laporan	1 Laporan	100%	Ya	61.474.656,00	Terkait	23.021.600,00	37,45
									Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	3 laporan	100%	Ya	792.157.978,00	Terkait	413.152.460,00	52,16
									Penilaian Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	4 laporan	4 laporan	100%	Ya	136.684.658,00	Terkait	111.966.000,00	81,92

									Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	Ya	7.485.470.831,00	Terkait	6.620.826.638,00	88,45
									Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah serta dokumen sosialisasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	Ya	99.999.527,00	Terkait	92.555.950,00	92,56
									Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%	Ya	17.639.564,00	Terkait	17.605.200,00	99,81
									Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Pengurus barang yang diberi pembinaan pengelolaan BMD	367 Orang	367 Orang	100%	Ya	130.997.885,00	Terkait	108.205.650,00	82,60

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	82	82,85 %	101,0 4%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Komponen Perencanaan	Ya	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah								
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	1 paket	8 dokumen BMD	100%	Ya	7.496.501,00	Terkait	6.747.000,00	90,00
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	20 paket	40 SKPD	100%	Ya	1.269.276.661,00	Terkait	1.107.095.400,00	87,22
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*)	9 paket				9.980.749,00		8.845.000,00	
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	1 Jenis	100%	Ya	49.999.844,00	Terkait	42.572.400,00	85,15
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 laporan	11 jenis	100%	Ya	1.975.000.000,00	Terkait	1.968.127.164,00	99,65
											Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2 Jenis	100%	Ya	514.794.863,00	Terkait	507.990.000,00	98,68

										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	240 kali	100%	Ya	24.975.000,00	Terkait	22.500.000,00	90,09
								7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	100%	Ya	99.900.000,00	Terkait	89.908.000,00	90,00	
									Pengadaan Mebel	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	92 Unit	92 Unit	100%	Ya	285.930.450,00	Terkait	273.095.000,00		
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit	100%	Ya	1.224.072.955,00	Terkait	1.150.730.000,00	94,01	
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	100%	Ya	0,00	Terkait	0,00	0,00	
								8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah									

										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100%	Ya	311.650.185,00	Terkait	184.492.243,00	59,20
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	Ya	491.677.212,00	Terkait	469.320.347,00	95,45
									<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah								
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpeliharaan*) (unit)	1 unit	1 unit	100%	Ya	35.000.000,00	Terkait	21.460.300,00	61,32
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	15 unit	100%	Ya	58.500.000,00		57.766.900,00	







### **3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024**

Untuk menggambarkan pencapaian realisasi belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta membandingkannya selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 dan untuk mengetahui pengukuran terhadap pencapaian peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

#### **Tabel perbandingan realisasi capaian sasaran strategis Program dan Kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024**

Berikut ini disajikan realisasi pencapaian sasaran strategis BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 dapat dibandingkan realisasi pencapaian sasaran tahun 2023. Selain perbandingan realisasi pencapaian sasaran seperti yang telah dibahas sebelumnya dapat dilihat baik peningkatan maupun penurunan dalam realisasi pencapaian sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Gambaran tentang target dan realisasi pencapaian sasaran strategis dan realisasi pendanaan BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SARGIS	IK SARGIS	IKU/ BUKAN IKU	TARGE T KINER JA 2023 IKU/ BUKA N IKU	REA LIS ASI TAH UN 202 3	TARGE T KINER JA 2024 IKU/ BUKA N IKU	REALIS ASI TAHU N 2024	NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T KINER JA OUTP UT 2023	REA LIS ASI O U T P U T T A H U N 2 0 2 3	REALIS ASI FISIK % THN 2023	TARGET KINERJA OUTPUT 2024	REALISA SI OUTPUT TAHUN 2024	REALI SASI FISIK % THN 2024	ANGGAR AN TAHUN 2023(RP. )	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2023	CAPAIAN % TAHUN 2023	ANGGAR AN TAHUN 2024(RP.)	REALISAS I KEUANG AN TAHUN 2024	CAPAIAN % TAHUN 2024			
																								URAIAN PROGR AM	SASARA N PROGRA M	IND IKA TO R SAS AR AN PR OG RA M
1	2	3	4	6	6	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	18	22	21	21	22	26	27	28	26	27
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP																			



									Meningkatkannya kualitas usulan alokasi belanja Perangkat Daerah sesuai dengan target kinerja OPD	Jumlah OPD yang alokasi belanjanya disesuaikan dengan target kerjanya	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	9 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	48.646.200	40.360.600	82,97	43.350.337,00	29.687.850,00	68,4	
									Meningkatkan ketepatan kapasitas real kemampuan keuangan/proyeksi penerimaan tahun rencana	Tingkat ketepatan kapasitas real keuangan daerah yang dinilai	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	1 Dokumen	40 SKPD	40 SKPD	100%	40 SKPD	40 SKPD	100%	14.844.613	14.124.500	95,15	15.990.844,00	14.620.884,00	91,4
									Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah	Persentase data keuangan yang terinformasikan dalam lap	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	8 Dokumen	40 SKPD	40 SKPD	100%	40 SKPD	40 SKPD	100%	14.844.699	13.590.500	91,55	15.998.398,00	11.878.400,00	74,2



									Tersedia dana daerah sesuai kebutuhan	Perencanaan dan pelaksanaan yang tersedia sesuai kebutuhan	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perkada APBD	3 dokumen	2 Dokumen	100%	207.129.980	131.267.470	63,37	254.998.249,00	219.655.865,00	86,14
						3		Meningatkannya kualitas usulan alokasi belanja Perangkat Daerah sesuai dengan target kinerja OPD	Jumlah OPD yang alokasi belanjanya sesuai dengan targetkinerjanya	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perkada Perubahan APBD	5 dokumen	2 Dokumen	100%	154.312.113	79.687.000	51,64	234.759.110,00	186.042.185,00	79,24	
								Meningatkannya ketepatan kapasitas kemampuan keuangan/proyeksi penerima tahun rencana	Tingkat ketepatan kemampuan keuangan real keuangannya/proyeksi penerima tahun rencana	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Pedoman Penyusunan RKA SKPD	1 persil, 10 permonan penyerifikatan, 3 buah kendaraan dinas bermotor PPKD	6 Dokumen	100%	28.341.775	19.699.000	69,51	30.994.818,00	21.533.865,00	69,48	









										25	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen		1 2 D o k u m e n			12 Dokumen	100%	34.192.365	28.496.420	<b>83,34</b>	39.966.795,00	37.764.528,00	<b>94,4</b>	
										26	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah FGD		2 D o k u m e n			2 Dokumen	100%	-	-	<b>0,00</b>	74.999.366,00	67.315.900,00	<b>0,9</b>	
							2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WT P	5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Presentase capaian pengelolaan Barang Milik Daerah												
											27	Penyusunan Standar Harga	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 D o k u m e n	100%	1 D o k u m e n	1 Dokumen	100%	396.675.125	161.176.004	<b>40,63</b>	79.999.243,00	40.863.600,00	<b>51,0</b>	
											28	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 1 D o k u m e n	100%	41 D o k u m e n	41 Dokumen	100%	12.407.911.235	11.959.058.329	<b>96,38</b>	4.938.852.811,00	#####	<b>83,8</b>	















Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja keuangan pada tahun 2024 adalah sebesar 90,25% mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dari tahun 2023 yaitu sebesar 91,43%, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan pada masa Renstra SKPD Tahun 2024-2026, yaitu telah dicapai target akuntabel / dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu terbukti dengan telah diraihnya opini WTP dari auditor BPK RI selama 11 (sebelas) tahun berturut-turut, hal ini dikarenakan adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk bersama-sama dalam meningkatkan kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Tanah Laut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 yang merupakan tahun kesatu Renstra 2024-2026, sehingga dengan demikian tujuan BPKAD sudah tercapai dengan diraihinya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 11 (sebelas) tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Laporan Kinerja (LKj) ini memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan secara akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Dapat disimpulkan bahwa dari 4 indikator kinerja sasaran strategis yang ditargetkan hampir semuanya dapat dilaksanakan dan tercapai target kinerjanya, pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- 1). Sasaran Strategis Nomor 1 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dengan indikator Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%, dan pada Tahun 2023 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk yang ke 11 (sebelas) kalinya, sehingga dengan demikian bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam tahun Renstra BPKAD 2013-2018, tahun Renstra 2018-2023 dan Tahun Renstra 2024-2026, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD dalam

mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mendukung sasaran IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta tanggungjawab Bidang Belanja & Pembiayaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset dan Bidang Penatausahaan Aset.

- 2). Sasaran Strategis Nomor 2 Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah dengan indikator Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD telah mendapatkan nilai sebesar 100% yaitu dengan penjelasan bahwa Kas daerah dapat dipenuhi sesuai dengan surat penyediaan dana yang telah diterbitkan oleh BPKAD, sehingga dapat diyakini bahwa surat penyediaan dana yang terbit dipastikan dapat dipenuhi dengan Kas daerah yang tersedia dan dapat dipastikan belanja daerah terbayar pada tahun anggaran bersangkutan.
- 3). Sasaran Strategis Nomor 3 Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan dengan indikator Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan capaian kinerjanya melebihi mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 138,82%, yaitu dengan penjelasan bahwa penganggaran lebih besar dari pada perencanaan, hal ini disebabkan adanya Dana Alokasi Khusus, adanya tambahan Dana Intensif Fiskal, adanya tambahan DBH Sawit dan setelah adanya TKDD ada peluang untuk menambah volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang masih belum terakomodir alokasi anggaran pada RKPD, sehingga pada setiap tahun penganggaran tidak dapat diprediksi pada saat perencanaan karena ditahapan perencanaan Pemerintah kabupaten Tanah Laut telah menghitung kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas.
- 4) Sasaran Strategis Nomor 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD dengan indikator Nilai SAKIP BPKAD yang merupakan IKU Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut capaian kinerjanya melebihi target yang telah

ditetapkan yaitu 101,04 %, bahwa rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian SAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92% dan tahun 2019 adalah penilaian SAKIP Tahun 2018 adalah sebesar 113,61%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah penilaian SAKIP Tahun 2019 sebesar 131,98%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah penilaian SAKIP Tahun 2020 sebesar 130,75% mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,23%. Pada tahun 2022 adalah penilaian SAKIP Tahun 2021 sebesar 116,67% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 14,08%. Pada tahun 2023 adalah penilaian SAKIP Tahun 2022 sebesar 116,43% mengalami penurunan dari tahun 2022. Pada tahun 2024 adalah penilaian SAKIP Tahun 2023 sebesar 101,04% mengalami penurunan dari tahun 2023. Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 4 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut telah dilaksanakan dengan baik.

- 5) Pejabat struktural Eselon IV telah membuat Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 yang menjadi tanggungjawabnya sebagai langkah Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsungnya sebagai bukti telah dilakukan pengawasan internal dari Atasan Langsung kepada Pejabat Struktural dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap kinerja kegiatan-kegiatan di Bidanganya masing-masing sebagai bahan acuan pedoman untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menerapkan berbagai strategi peningkatan kinerja. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, memperbaiki proses kerja, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Berikut adalah strategi utama yang diterapkan:

### **1. Digitalisasi dan Otomatisasi Sistem Keuangan**

- Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk meningkatkan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.
- Penggunaan e-budgeting, e-reporting, dan e-payment untuk meminimalisir kesalahan serta mempercepat proses administrasi keuangan.
- Penerapan tanda tangan elektronik guna mempercepat verifikasi dan persetujuan dokumen keuangan.

### **2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah**

- Pemetaan dan inventarisasi aset untuk memastikan pemanfaatan yang lebih produktif.
- Menyewakan aset tidak produktif kepada pihak ketiga guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Penghapusan aset yang tidak layak pakai melalui mekanisme lelang untuk mengurangi beban biaya perawatan.
- Penerapan sistem digital dalam pengawasan dan pemeliharaan aset guna menghindari kehilangan atau kerusakan yang tidak terdeteksi.

### **3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan**

- Menerapkan sistem laporan keuangan berbasis digital untuk memastikan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Melakukan audit internal secara berkala untuk mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
- Penyusunan kebijakan yang jelas dan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

#### 4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi

- Pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai di bidang akuntansi, perbendaharaan, dan pengelolaan aset.
- Peningkatan disiplin dan produktivitas SDM melalui evaluasi kinerja berbasis indikator capaian kerja.
- Membangun budaya kerja berbasis integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang prima.

#### 5. Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran

- Evaluasi perencanaan anggaran berbasis kinerja guna memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan prioritas pembangunan.
- Pengurangan idle cash dan optimalisasi kas daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan dana publik.
- Pengurangan biaya operasional melalui digitalisasi dan otomatisasi proses administrasi.

#### 6. Kolaborasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

- Kerja sama dengan lembaga keuangan dan pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- Penggunaan teknologi inovatif dalam pemantauan dan pengelolaan aset serta keuangan daerah.
- Penerapan konsep tata kelola keuangan berbasis data guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut berupaya untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan dan aset yang lebih efisien, modern, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mendukung visi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur, sumber dana serta dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapatnya kelemahan-kelemahan seperti terbatasnya tenaga profesional serta pelaksanaan tugas pada BPKAD sangat tergantung dari input SKPD lainnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan SKPD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut diantaranya dengan berupaya secara bertahap terus meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin SDM aparatur pada BPKAD serta peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas. Serta upaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja baik pada waktu tahun berjalan maupun setelah akhir tahun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan, salah satunya dengan memberikan reward dan penghargaan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pengurus Barang terbaik setiap tahunnya. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta kerjasama dengan institusi lain.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD khususnya bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

**Pelaihari, 17 Januari 2025**

**Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut,**

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT' around the top edge and 'BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**

**NIP. 19661227 198703 1 002**

## **FOTO-FOTO KEGIATAN DI BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

### **A. Foto - Foto Kegiatan Subbid Perencanaan Kebutuhan Tahun 2024**

#### **1). Foto Sosialisasi tentang Standar Harga Satuan**



#### **2). Foto Kendaraan Sewa**



### 3). Monev Mobil Sewa



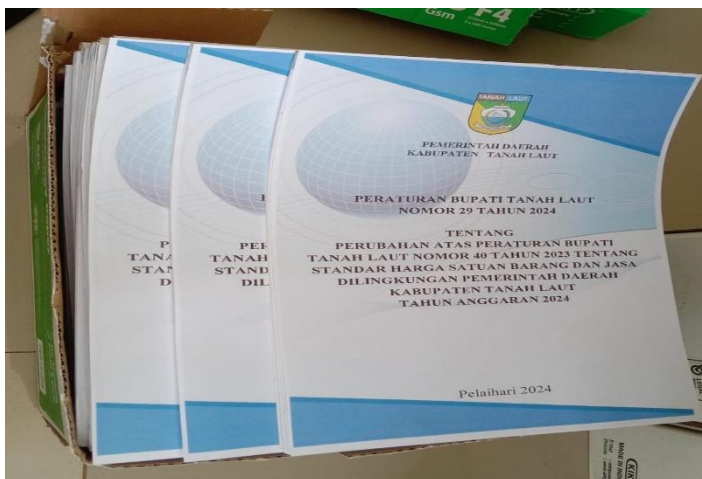
### 4). Buku Perbup SHS 2025



### 5). Buku Standar Kebutuhan BMD



**6). Buku Perbup 29 tahun 2024 tentang Perubahan Perbup 40 tahun 2023**



**7). Buku Perbup SIBAPER**



**8). Rekonsiliasi barang pakai habis**



### 1. Kegiatan Monitoring Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun 2024





## 2. Kegiatan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun



3.



P



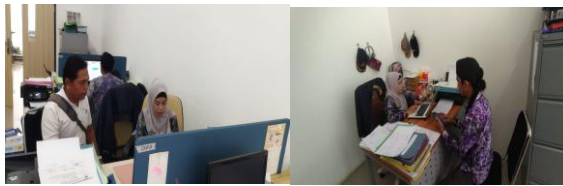
LKj



8



18



### Kegiatan Pemindahtanganan (Hibah dan Lelang) Barang Milik Daerah Tahun 2024

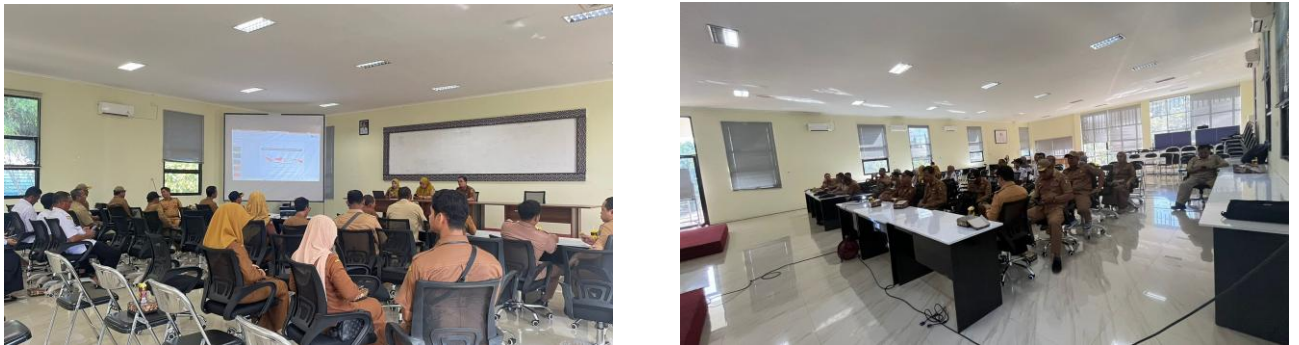




**5. Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2024**



**6. Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD**





**7. Rekonsiliasi Keuangan Triwulan IV TA 2023 pada tanggal 25 s.d 28 Maret 2024**

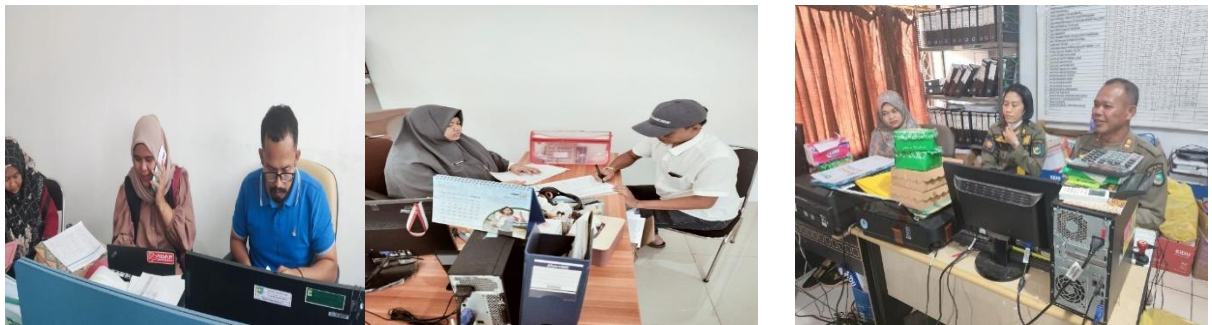


**8. Rekonsiliasi Keuangan Triwulan I TA 2024 pada tanggal 10 s.d 13 Juni 2024**





**9. Rekonsiliasi Keuangan Triwulan II TA 2024 pada tanggal 06 s.d 09 Agustus 2024**



**10. Rekonsiliasi Keuangan Triwulan III TA 2024 pada tanggal 22 s.d 25 Oktober 2024**

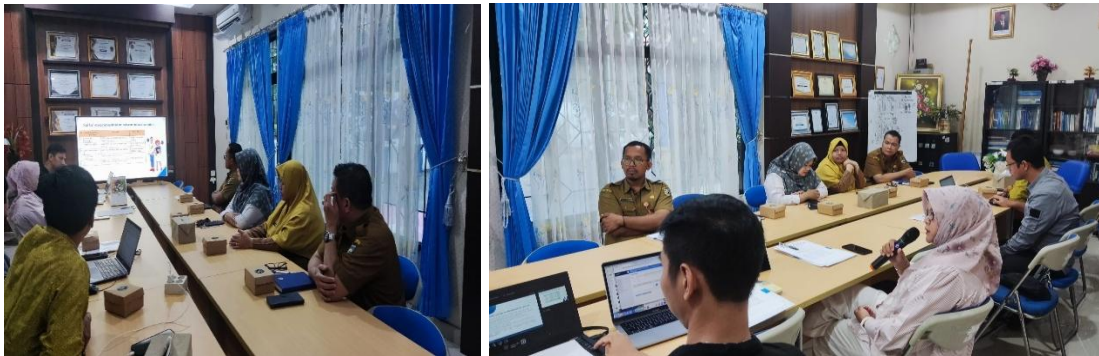




**11. Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 2 TA 2023 pada tanggal 27 Februari 2024**



## 12. Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester I TA 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024



## 13. Rekonsiliasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tanggal 14 Oktober 2024





**14. Rekonsiliasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tanggal 14 Oktober 2024**





**15. Rekonsiliasi Belanja Modal Semester II TA 2023 pada tanggal 18, 19 dan 22 April 2024**





**16. Rekonsiliasi Belanja Modal Semester I TA 2023 pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2024**



**17. Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Semester I TA 2024 pada tanggal 12 dan 13 Desember 2024**





**18. Melaksanakan Desk Realisasi bulan Januari 2024 pada tanggal 01 dan 02 Februari 2024**



**19. Melaksanakan Desk Realisasi bulan Februari 2024 pada tanggal 18 dan 19 Maret 2024**



**20. Melaksanakan Desk Realisasi bulan Maret 2024 pada tanggal 01 dan 02 April 2024**



**21. Melaksanakan Desk Realisasi bulan April 2024 pada tanggal 02, 03 dan 06 Mei 2024**



**22. Melaksanakan Desk Realisasi bulan Mei 2024 pada tanggal 03, 04 dan 05 Juni 2024**



**23. Melaksanakan Desk Realisasi bulan Juni 2024 pada tanggal 01, 02 dan 03 Juli 2024**



**24. Melaksanakan Desk Realisasi bulan Juli 2024 pada tanggal 01, 02 dan 05 Agustus 2024**



**25. Melaksanakan Desk Realisasi bulan Agustus 2024 pada tanggal 02, 03 dan 04 September 2024**



**26. Melaksanakan Desk Realisasi bulan September 2024 pada tanggal 07, 08 dan 09 November 2024**



**27. Melaksanakan Desk Realisasi bulan November 2024 pada tanggal 02, 03 dan 04 Desember 2024**



**28. Melaksanakan Desk Realisasi s.d Bulan Juni 2024 antara SKPD dengan TAPD pada tanggal 31 Juli 2024**



**29. Melaksanakan FGD DAK Fisik dan Non Fisik pada tanggal 06 Juni 2024**



**30. Mengikuti Kegiatan FGD Penyusunan Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban di Kantor Penghubung Kalsel di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2024**



**31. Melaksanakan Konsultasi terkait Penyampaian Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 untuk Bahan Evaluasi Gubernur di BPKAD Prov Kalsel pada tanggal 04 September 2024**



**32. Melaksanakan Pembinaan SKPD Terkait Troubleshooting Data Realisasi Keuangan LRA, Dashboard dan LPJ Fungsional SKPD pada tanggal 09 Desember 2024**



**33. Melaksanakan penginputan saldo awal TA 2024 SIPD pada tanggal 11 Juli 2024**



**34. Melaksanakan penginputan saldo awal TA 2024 SIKAT pada tanggal 16 Desember 2024**



**35. Melaksanakan penginputan saldo awal TA 2024 SIKAT pada tanggal 17 Desember 2024**



**36. Melaksanakan Pembinaan SKPD Terkait Troubleshooting Data Realisasi Keuangan LRA, Dashboard dan LPJ Fungsional SKPD pada tanggal 09 Desember 2024**



**37. Melaksanakan Rapat tentang Dana BOS, BOP PAUD dan Kesetaraan pada tanggal 09 Desember 2024**



**38. Melaksanakan FGD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD pada tanggal 19 Desember 2024**



**39. Melaksanakan FGD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD pada tanggal 07 Juni 2024**



**40. Melaksanakan Rapat Evaluasi Realisasi SKPD s.d Bulan Mei 2024 pada tanggal 18 Mei 2024**



**41. Pembahasan Raperda dan Raperbup TA 2023 antara DPRD Kab. Tanah Laut dengan SKPD pada tanggal 15 s.d 18 Juli 2024**



**42. Kegiatan Monitoring Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Tahun Anggaran 2024**





**43. Kegiatan Rekonsiliasi Pengamanan dan Pemeliharaan BMD**



**44. Kegiatan Pemeliharaan BMD**



**45. Kegiatan Pengamanan Fisik BMD (Pemasangan Papan Nama dan Patok)**



**46. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor**



**47. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi**



# KOORDINASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS TRIWULAN IV TAHUN 2023, TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2024



## REKON KAS BLUD TRIWULAN IV TAHUN 2023, TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2024



**SOSIALISASI PENDAPATAN PADA APLIKASI SIPD RI DAN PERCEPATAN  
PENGINPUTAN TRANSAKSI PENERIMAAN KAS KE DALAM APLIKASI  
SIPD RI TAHUN ANGGARAN 2024**



**FOCUS GROUP DISCUSSION DANA TRANSFER UMUM DAN BIMBINGAN  
TEKNIS PENARIKAN DANA TREASURY DEPOSIT FACILITY TAHUN 2024**



## **MONITORING DAN EVALUASI TRANSAKSI PENERIMAAN KAS PADA APLIKASI SIPD RI**



## **FOCUS GROUP DISCUSSION DAN PEMBINAAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN BLUD SE-KABUPATEN TANAH LAUT**





## SOSIALIASI PENGINTUPAN PENDAPATAN KE DALAM APLIKASI PENDAMPING





**RAPAT PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**



## RAPAT TROUBLE SHOOTING PENJURNALAN PENERIMAAN BLUD DI SIPD RI



**KEGIATAN PENGGALIAN DATA DAN INFORMASI KASUS KEKURANGAN UANG DAERAH DALAM PENGELOLAAN BENDAHARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**



**RAPAT KOORDINASI PEMENUHAN SYARAT SALUR DANA TRANSFER  
DIANTARANYA DANA ALOKASI UMUM SPECIFIC GRANT, DANA BAGI  
HASIL SAWIT, INSENTIF FISKAL TAHUN SEBELUMNYA DAN INSENTIF  
FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN**



## RAPAT SOSIALIASI EDARAN LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024



## RAPAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH



## **RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRANSAKSI PENERIMAAN KAS**



## **RAPAT PENYAMAAN PERSEPSI DAN EVALUASI BAGI BENDAHARA BLUD**

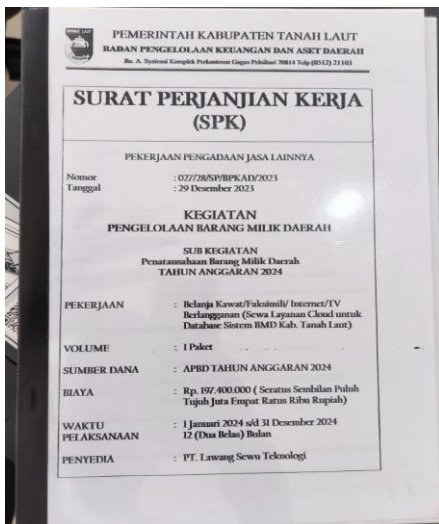




Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah







Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah



## Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah





**Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota**





## KEGIATAN PADA SUBBID PERBENDAHARAAN





**Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun 2024**

- Kabupaten : Tanah Laut  
 Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Tugas : Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.  
 Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
 c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan dan aset daerah;  
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

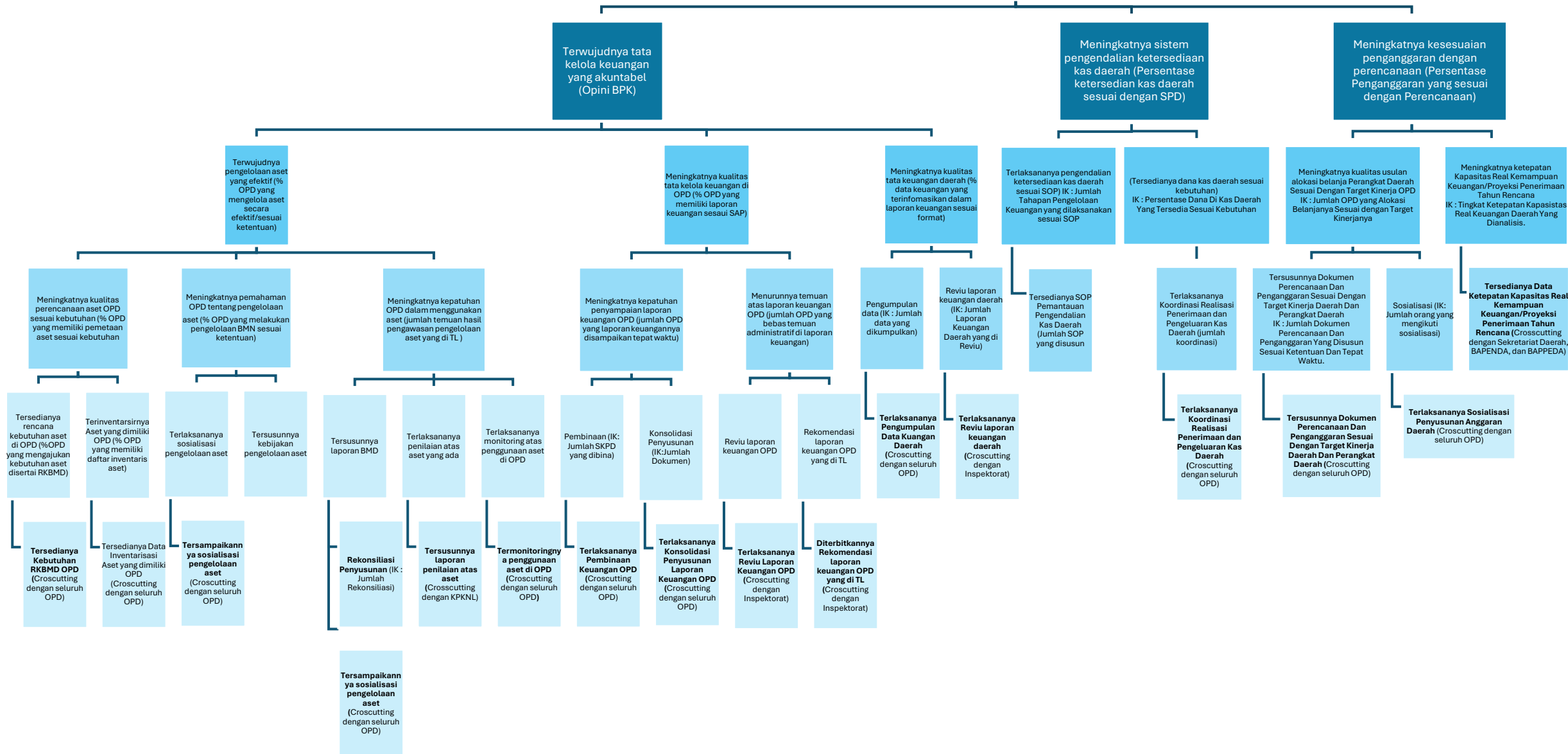
No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel, Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah, dan Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	BPKAD
		2	Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD	$\frac{\text{Ketersediaan Kas Daerah sesuai dengan SPD}}{\text{Ketersediaan Kas Daerah}} \times 100\%$	
		3	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	$\frac{\text{Penganggaran}}{\text{Perencanaan}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	1	Nilai SAKIP BPKAD	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten terhadap SAKIP SKPD	



**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**

NIP. 196612271987031002

# Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)





**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT ESELON II  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DARMIN. S.IP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Syamsir Rahman**  
Jabatan : **PJ. BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
PJ. BUPATI TANAH LAUT

**Syamsir Rahman**

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**MUHAMMAD DARMIN. S.IP, M.Si**  
NIP. 196612271987031002

**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT ESELON II  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	<b>Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel, Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah, dan Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan</b>			
	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini WTP	1
	1	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100
	1	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100
2	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD</b>			
	1	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	82

**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN****ANGGARAN**

5.02.03. Program PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. Rp 12.134.337.902,00
5.02.03.2.01. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. Rp 12.134.337.902,00
5.02.03.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Standar Harga	Rp. Rp 79.999.243,00
5.02.03.2.01.02. SubKegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. Rp 4.938.852.811,00
5.02.03.2.01.04. SubKegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. Rp 44.997.739,00
5.02.03.2.01.05. SubKegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. Rp 540.358.382,00
5.02.03.2.01.06. SubKegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. Rp 79.999.656,00
5.02.03.2.01.07. SubKegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. Rp 979.995.038,00
5.02.03.2.01.08. SubKegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Rp. Rp 159.999.658,00
5.02.03.2.01.09. SubKegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. Rp 5.049.138.146,00
5.02.03.2.01.10. SubKegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. Rp 99.999.527,00
5.02.03.2.01.12. SubKegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. Rp 29.999.564,00
5.02.03.2.01.13. SubKegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 130.998.138,00
5.02.02. Program PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. Rp 294.607.946.433,00
5.02.02.2.01. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. Rp 647.736.361,00
5.02.02.2.01.01. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. Rp 43.458.740,00
5.02.02.2.01.02. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. Rp 43.498.928,00
5.02.02.2.01.03. SubKegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp. Rp 15.990.844,00
5.02.02.2.01.04. SubKegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp. Rp 15.998.398,00
5.02.02.2.01.05. SubKegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp. Rp 3.999.762,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5.02.02.2.01.06. SubKegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp. Rp 3.999.118,00
5.02.02.2.01.07. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. Rp 254.998.249,00
5.02.02.2.01.08. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. Rp 234.797.504,00
5.02.02.2.01.09. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp. Rp 30.994.818,00
5.02.02.2.02. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. Rp 154.680.552,00
5.02.02.2.02.03. SubKegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp. Rp 14.494.045,00
5.02.02.2.02.04. SubKegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp. Rp 46.918.516,00
5.02.02.2.02.08. SubKegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp. Rp 14.469.379,00
5.02.02.2.02.10. SubKegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp. Rp 13.898.250,00
5.02.02.2.02.11. SubKegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 64.900.362,00
5.02.02.2.03. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. Rp 998.682.324,00
5.02.02.2.03.01. SubKegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp. Rp 149.991.699,00
5.02.02.2.03.02. SubKegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp. Rp 154.995.096,00
5.02.02.2.03.03. SubKegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp. Rp 210.441.405,00
5.02.02.2.03.04. SubKegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. Rp 149.985.438,00
5.02.02.2.03.05. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp. Rp 218.298.593,00
5.02.02.2.03.07. SubKegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp. Rp 39.970.608,00
5.02.02.2.03.11. SubKegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 74.999.485,00
5.02.02.2.04. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. Rp 292.806.847.196,00
5.02.02.2.04.08. SubKegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp. Rp 265.662.459.504,00
5.02.02.2.04.09. SubKegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp. Rp 27.144.387.692,00
5.02.01. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. Rp 14.705.114.100,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5.02.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Rp 17.993.125,00
5.02.01.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. Rp 8.495.277,00
5.02.01.2.01.07. SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Rp 9.497.848,00
5.02.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. Rp 8.778.383.440,00
5.02.01.2.02.01. SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. Rp 8.764.389.250,00
5.02.01.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. Rp 13.994.190,00
5.02.01.2.05. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. Rp 116.897.500,00
5.02.01.2.05.02. SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. Rp 46.897.500,00
5.02.01.2.05.11. SubKegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. Rp 70.000.000,00
5.02.01.2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. Rp 3.240.443.618,00
5.02.01.2.06.01. SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. Rp 7.496.501,00
5.02.01.2.06.02. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. Rp 1.119.276.661,00
5.02.01.2.06.03. SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. Rp 9.980.749,00
5.02.01.2.06.05. SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. Rp 49.999.844,00
5.02.01.2.06.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. Rp 1.500.000.000,00
5.02.01.2.06.10. SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. Rp 473.769.863,00
5.02.01.2.06.11. SubKegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. Rp 79.920.000,00
5.02.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. Rp 1.575.138.205,00
5.02.01.2.07.02. SubKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. Rp 99.900.000,00
5.02.01.2.07.05. SubKegiatan Pengadaan Mebel	Rp. Rp 285.930.450,00
5.02.01.2.07.06. SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. Rp 998.831.755,00
5.02.01.2.07.10. SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 190.476.000,00
5.02.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 856.227.212,00
5.02.01.2.08.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. Rp 364.550.000,00
5.02.01.2.08.04. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. Rp 491.677.212,00
5.02.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 120.031.000,00
5.02.01.2.09.01. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. Rp 15.000.000,00
5.02.01.2.09.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. Rp 58.500.000,00
5.02.01.2.09.06. SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. Rp 24.531.000,00

**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**

5.02.01.2.09.09. SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**ANGGARAN**

Rp. Rp 22.000.000,00

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Kedua

PJ. BUPATI TANAH LAUT



Syamsir Rahman

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



MUHAMMAD DARMIN. S.IP, M.Si

NIP. 196612271987031002



**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT ESELON II  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DARMIN. S.IP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Syamsir Rahman**  
Jabatan : **PJ. BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
PJ. BUPATI TANAH LAUT

  
**Syamsir Rahman**

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Pertama  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

  
**MUHAMMAD DARMIN. S.IP, M.Si**  
NIP. 196612271987031002

**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT ESELON II  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	<b>Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel, Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah, dan Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan</b>			
	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini WTP	1
	1	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100
	1	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100
2	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD</b>			
	1	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	82

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5.02.03. Program PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 14.328.633.274,00
5.02.03.2.01. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 14.328.633.274,00
5.02.03.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Standar Harga	Rp. 79.999.243,00
5.02.03.2.01.02. SubKegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 4.938.852.811,00
5.02.03.2.01.04. SubKegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 44.997.739,00
5.02.03.2.01.05. SubKegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 540.358.382,00
5.02.03.2.01.06. SubKegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 61.474.656,00
5.02.03.2.01.07. SubKegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 792.157.978,00
5.02.03.2.01.08. SubKegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Rp. 136.684.658,00
5.02.03.2.01.09. SubKegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 7.485.470.831,00
5.02.03.2.01.10. SubKegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 99.999.527,00
5.02.03.2.01.12. SubKegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 17.639.564,00
5.02.03.2.01.13. SubKegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 130.997.885,00
5.02.02. Program PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 301.451.519.756,00
5.02.02.2.01. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 644.849.376,00
5.02.02.2.01.01. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 43.458.740,00
5.02.02.2.01.02. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 43.350.337,00
5.02.02.2.01.03. SubKegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp. 15.990.844,00
5.02.02.2.01.04. SubKegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp. 15.998.398,00
5.02.02.2.01.05. SubKegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp. 1.299.762,00

<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
5.02.02.2.01.06. SubKegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp. 3.999.118,00
5.02.02.2.01.07. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 254.998.249,00
5.02.02.2.01.08. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 234.759.110,00
5.02.02.2.01.09. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp. 30.994.818,00
5.02.02.2.02. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 147.455.552,00
5.02.02.2.02.03. SubKegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp. 7.269.045,00
5.02.02.2.02.04. SubKegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp. 46.918.516,00
5.02.02.2.02.08. SubKegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp. 14.469.379,00
5.02.02.2.02.10. SubKegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp. 13.898.250,00
5.02.02.2.02.11. SubKegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 64.900.362,00
5.02.02.2.03. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 998.668.258,00
5.02.02.2.03.01. SubKegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp. 149.990.000,00
5.02.02.2.03.02. SubKegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp. 154.995.096,00
5.02.02.2.03.03. SubKegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp. 210.441.265,00
5.02.02.2.03.04. SubKegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 149.977.185,00
5.02.02.2.03.05. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp. 218.298.551,00
5.02.02.2.03.07. SubKegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp. 39.966.795,00
5.02.02.2.03.11. SubKegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 74.999.366,00
5.02.02.2.04. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 299.660.546.570,00
5.02.02.2.04.08. SubKegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp. 270.441.290.812,00
5.02.02.2.04.09. SubKegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp. 29.219.255.758,00
5.02.01. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 15.482.483.408,00

<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
5.02.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 17.993.125,00
5.02.01.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 8.495.277,00
5.02.01.2.01.07. SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 9.497.848,00
5.02.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.898.041.363,00
5.02.01.2.02.01. SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.884.047.173,00
5.02.01.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 13.994.190,00
5.02.01.2.05. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 46.897.500,00
5.02.01.2.05.02. SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 46.897.500,00
5.02.01.2.05.11. SubKegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 0
5.02.01.2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.851.523.618,00
5.02.01.2.06.01. SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.496.501,00
5.02.01.2.06.02. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.269.276.661,00
5.02.01.2.06.03. SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 9.980.749,00
5.02.01.2.06.05. SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 49.999.844,00
5.02.01.2.06.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.975.000.000,00
5.02.01.2.06.10. SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 514.794.863,00
5.02.01.2.06.11. SubKegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 24.975.000,00
5.02.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.609.903.405,00
5.02.01.2.07.02. SubKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 99.900.000,00
5.02.01.2.07.05. SubKegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 285.930.450,00
5.02.01.2.07.06. SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 1.224.072.955,00
5.02.01.2.07.10. SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0
5.02.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 803.327.397,00
5.02.01.2.08.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 311.650.185,00
5.02.01.2.08.04. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 491.677.212,00
5.02.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 254.797.000,00
5.02.01.2.09.01. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 35.000.000,00
5.02.01.2.09.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 58.500.000,00
5.02.01.2.09.06. SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 39.297.000,00

**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**

5.02.01.2.09.09. SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**ANGGARAN**

Rp. 122.000.000,00

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua


PJ. BUPATI TANAH LAUT



**Syamsir Rahman**

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



**MUHAMMAD DARMIN. S.IP, M.Si**  
NIP. 196612271987031002

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**CAPAIAN IKU BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN LALU	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KETERANGAN	
					TARGET	REALISASI SD TRIWULAN INI	CAPAIAN (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	-	-	WTP	100%	-
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	2	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	-	-	100	100%	
3	Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	3	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	100	-	-	100	100%	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	4	Nilai SAKIP BPKAD	NILAI	81,50	82	-	-	84	100%	

Pelihar, 1 April 2024  
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut

  
**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**  
NIP. 19661227 198703 1 002

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**CAPAIAN IKU BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN LALU	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KETERANGAN	
					TARGET	REALISASI SD TRIWULAN INI	CAPAIAN (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%	-
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	2	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	-	-	100	100%	
3	Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	3	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	100	-	-	100	100%	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	4	Nilai SAKIP BPKAD	NILAI	81,50	82	82,85	101,04%	84	100%	



Pelaksana, 1 Juli 2024  
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut

**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**  
NIP. 19661227 198703 1 002

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**CAPAIAN IKU BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN LALU	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KETERANGAN	
					TARGET	REALISASI SD TRIWULAN INI	CAPAIAN (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%	-
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	2	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	-	-	100	100%	
3	Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	3	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	100	-	-	100	100%	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	4	Nilai SAKIP BPKAD	NILAI	81,50	82	82,85	101,04%	84	100%	

Pelantar, 1 Oktober 2024  
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**  
W.P. 19661227 198703 1 002

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**CAPAIAN IKU BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN LALU	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KETERANGAN	
					TARGET	REALISASI SD TRIWULAN INI	CAPAIAN (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%	-
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	2	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	100	100%	100	100%	-
3	Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	3	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	100	138,82	138,82%	100	100%	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	4	Nilai SAKIP BPKAD	NILAI	81,50	82	82,85	101,04%	84	100%	-

Pelaihari, 31 Desember 2024  
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**  
NIP. 19661227 198703 1 002

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Renstra)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN			SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/IKU	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE			Ket
				2024	2025	2026				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	WTP	Kepala Badan
							Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	100	
							Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	100	100	
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten		70.1 (BB)	75.00 (BB)	80.1 (A)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	82	83	84	

Pelaihari, 2 Januari 2024

KEPALA BPKAD

Kabupaten Tanah Laut,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.SI  
NIP. 19661227 198703 1 002

**Realisasi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2024  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
				2024	2024	2024				2024	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	66 (PB)	79,645 (BAIK)	120,68%	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	100%
							Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	100%
							Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	138,82	138,82%
2	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten		70.1 (BB)	70.16 (BB)	100,09%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	82	82,85%	101,04%

Pelahari, 31 Desember 2024  
KEPALA BPKAD  
Kabupaten Tanah Laut,


  
**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**  
 NIP.19661227 198703 1 002

**MATRIK KESELARASAN RENSTRA SKPD DENGAN KINERJA OUTPUT PENGANGGARAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH TAHUN 2024**

Tujuan 1 : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran 2 : Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	ANGGARAN (RP.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Ya	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Ya	IKU												
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	Ya	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	Ya	IKU												
3.	Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Ya	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	Ya	IKU	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengendalian ketersediaan kas daerah sesuai SOP	Jumlah tahapan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan sesuai SOP	Ya	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ya		
								Tersedianya dana kas daerah sesuai kebutuhan	Persentase dana di kas daerah yang tersedia sesuai kebutuhan			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Ya	43.458.740,00	Terkait
								Meningkatkannya kualitas usulan alokasi belanja Perangkat Daerah sesuai dengan target kinerja OPD	Jumlah OPD yang alokasi belanjanya sesuai dengan target kinerjanya			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ya	43.350.337,00	Terkait
								Meningkatkannya ketepatan kapasitas real kemampuan keuangan/proyeksi penerimaan tahun rencana	Tingkat ketepatan kapasitas real keuangan daerah yang dianalisis			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	15.990.844,00	Terkait
								Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Persentase data keuangan yang terinformasikan dalam laporan keuangan sesuai format			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	15.998.398,00	Terkait
								Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan di OPD	Persentase OPD yang memiliki laporan keuangan sesuai SAP			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	1.299.762,00	Terkait
								Terlaksananya pengendalian ketersediaan kas daerah sesuai SOP	Jumlah tahapan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan sesuai SOP			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	3.999.118,00	Terkait
								Tersedianya dana kas daerah sesuai kebutuhan	Persentase dana di kas daerah yang tersedia sesuai kebutuhan			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perkada APBD	Ya	254.998.249,00	Terkait
								Meningkatkannya kualitas usulan alokasi belanja Perangkat Daerah sesuai dengan target kinerja OPD	Jumlah OPD yang alokasi belanjanya sesuai dengan target kinerjanya			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perkada Perubahan APBD	Ya	234.759.110,00	Terkait
								Meningkatkannya ketepatan kapasitas real kemampuan keuangan/proyeksi penerimaan tahun	Tingkat ketepatan kapasitas real keuangan daerah yang dianalisis			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Ya	30.994.818,00	Terkait
										2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pemenuhan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah	Ya		

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	ANGGARAN (RP.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen SPD	Ya	7.269.045,00	Terkait
												Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	jumlah dokumen	Ya	46.918.516,00	Terkait
												Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pemerintah Kabupaten Tanah	jumlah dokumen	Ya	14.469.379,00	Terkait
												Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemerintah Kabupaten Tanah	jumlah dokumen	Ya	13.898.250,00	Terkait
												Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	jumlah dokumen	Ya	64.900.362,00	Terkait
											3	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Meningkatnya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ya		
												Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Desa yang tersalurkan Bantuan Keuangan	Ya	270.441.290.812,00	Terkait
												Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Ya	29.219.255.758,00	Terkait
											4	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase pemenuhan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ya		
												Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Ya	149.990.000,00	Terkait
												Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Ya	154.995.096,00	Terkait
												Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Ya	210.441.265,00	Terkait
												Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Ya	149.977.185,00	Terkait
												Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Ya	218.298.551,00	Terkait

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T)	ANGGARAN (RP.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Ya	39.966.795,00	Terkait
												Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Ya	74.999.366,00	Terkait
						2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pengelolaan aset yang efektif	Persentase OPD yang mengelola aset secara efektif sesuai ketentuan	Ya	5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	Ya		Terkait
												Penyusunan Standar Harga	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Ya	79.999.243,00	
												Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ya	4.938.852.811,00	Terkait
												Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ya	44.997.739,00	Terkait
												Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	Ya	540.358.382,00	Terkait
												Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	Ya	61.474.656,00	Terkait
												Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Ya	792.157.978,00	Terkait
												Penilaian Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Ya	136.684.658,00	Terkait
												Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ya	7.485.470.831,00	Terkait
												Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah serta dokumen sosialisasi	Ya	99.999.527,00	Terkait
												Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Ya	17.639.564,00	Terkait
												Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Pengurus brang yang diberi pembinaan pengelolaan BMD	Ya	130.997.885,00	Terkait
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Ya	Nilai SAKIP BPKAD	Ya	IKU	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Komponen Perencanaan	Ya	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Ya		
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	Ya	7.496.501,00	Terkait
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	Ya	1.269.276.661,00	Terkait

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T)	ANGGARAN (RP.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*)	Ya	9.980.749,00	Terkait
												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Ya	49.999.844,00	Terkait
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ya	1.975.000.000,00	Terkait
												Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Ya	514.794.863,00	Terkait
												Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ya	24.975.000,00	Terkait
											7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ya		
												Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ya	99.900.000,00	Terkait
												Pengadaan Mebel	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ya	285.930.450,00	Terkait
												Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ya	1.224.072.955,00	Terkait
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ya	0,00	Terkait
											8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Ya		
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ya	311.650.185,00	Terkait
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ya	491.677.212,00	Terkait
											9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Ya		
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Ya	35.000.000,00	Terkait
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Ya	58.500.000,00	Terkait
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Ya	39.297.000,00	Terkait
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara direhabilitasi	Ya	122.000.000,00	Terkait

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T)	ANGGARAN (RP.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Ya		
												Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut		Ya	46.897.500,00	Terkait
											11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Ya		Terkait
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	Ya	8.884.047.173,00	Terkait
												Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	Ya	13.994.190,00	Terkait
											12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Ya		Terkait
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )	Ya	8.495.277,00	
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ( )	Ya	9.497.848,00	Terkait
Jumlah total Anggaran															331.262.636.438,00		

Pelaihari, 2 Januari 2024

KEPALA BPKAD

Kabupaten Tanah Laut,

  
 MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si  
 NIP.19661227 198703 1 002